



# RENCANA STRATEGIS

## 2025-2029

PEMERINTAH KOTA DEPOK  
DINAS PERHUBUNGAN



<https://dishub.depok.go.id/>



021-29230770



Cilodong, Kota Depok

## **KATA PENGANTAR**

Pertama-tama kami panjatkan puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2025 – 2029 dapat disusun.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Perhubungan yang didukung dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 ini mengacu kepada RPJMD Kota Depok tahun 2025-2029 sebagai pedoman, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan pendanaan sehingga dapat selaras dalam pembangunan yang hendak dicapai oleh Kota Depok.

Dalam pelaksanaan Renstra di tahun ke-1 ini serta melihat perkembangan dinamika yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan maka perlu disusun tujuan, sasaran, indikator dan target indikator dalam Renstra Dinas Perhubungan sehingga bisa mencapai kinerja yang lebih baik.

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan berbagai pihak yang telah mendukung dan membantu penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 demi mewujudkan transportasi di Kota Depok yang lebih baik dan maju, semoga Allah SWT meridhoi segala upaya dan usaha kita, Amin.

Depok, 28 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK**



**Drs. ZAMROWI, M.Si**  
**NIP. 19640629 198503 1 005**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	9
1.3.1 Maksud.....	9
1.3.2 Tujuan.....	9
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .....	10
BAB II .....	12
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK .....	12
2.1 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN .....	12
2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan .....	12
KEPALA DINAS .....	13
SEKRETARIS DINAS .....	14
BIDANG LALU LINTAS.....	15
BIDANG ANGKUTAN .....	15
BIDANG BIMBINGAN KESELAMATAN DAN KETERTIBAN.....	16
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL.....	17
2.1.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan .....	17
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.....	28
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perhubungan .....	40
2.1.5 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	40
2.1.6 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	42
2.1.7 Telaahan Keterkaitan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dengan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perhubungan .....	47
2.1.8 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga.....	48
2.1.9 Telaah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.....	49
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	50
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan .....	50
2.2.2 Isu Strategis .....	53
BAB III .....	69
TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	69
3.1 TUJUAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029.....	70
3.2 SASARAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029 .....	70
3.3 STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.....	72
3.4 ARAH KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.....	74
BAB IV .....	77
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	77
4.1 URAIAN PROGRAM.....	77
4.2 URAIAN KEGIATAN .....	79
4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA INDIKATOR .....	79
4.4 URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA Mendukung Program PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....	98
4.5 TARGET Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD TAHUN 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja (IKU) Perangkat DAERAH. ....	100

4.6 TARGET KINERJA PENYELENGGAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029.....	101
BAB V.....	104
PENUTUP .....	104

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan .....	17
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Per Bagian/Seksi/Unit .....	18
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Menurut Pangkat, Golongan dan Ruang .....	19
Tabel 2.4 Sumber Daya Dinas Perhubungan .....	20
Tabel 2.5 Daftar Kendaraan Dinas Perhubungan Tahun 2025 .....	20
Tabel 2.6 Fasilitas Perlengkapan Jalan .....	23
Tabel 2.7 Kebutuhan Perlengkapan Jalan di Kota Depok .....	23
Tabel 2.8 Kondisi Perlengkapan Jalan di Kota Depok .....	24
Tabel 2.9 Rekapitulasi Jumlah Moda Angkutan Berdasarkan Jenis .....	25
Tabel 2.10 Kinerja Angkutan Dalam Kota Rata – Rata Tahun 2024.....	25
Tabel 2.11 Jumlah Uji KIR di Kota Depok .....	26
Tabel 2.12 Alat Uji KIR di Kota Depok .....	27
Tabel 2.13 Data Penguji Kendaraan Bermotor .....	28
Tabel 2.14 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2020 - 2024	30
Tabel 2.15 Capaian Kinerja Pelayanan Indikator Kinerja Utama Urusan Perhubungan Tahun 2021 - 2024.....	34
Tabel 2.16 Kinerja Ruas Jalan Tahun 2024.....	35
Tabel 2.17 Komponen Penilaian SAKIP .....	38
Tabel 2.18 Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2020 – 2024 .....	39
Tabel 2.19 Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025 – 2029.....	45
Tabel 2.20 Draft Rancangan Akhir RPJMD Kota Depok Tahun 2025 – 2029.....	45
Tabel 2.21 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan KLHS .....	51
Tabel 2.22 Isu Strategis Dinas Perhubungan .....	53
Tabel 2.23 Keterkaitan Isu KLHS dengan Isu Strategis PD .....	55
Tabel 2.24 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan dengan Visi, Misi dan Program.....	59
Tabel 2.25 Permasalahan Pelayanan Dishub Kota Depok Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan .....	63
Tabel 2.26 Permasalahan Pelayanan Dishub Kota Depok Berdasarkan Renstra Dishub Provinsi Jawa Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan .....	65
Tabel 2.27 Permasalahan Pelayanan Dishub Kota Depok Berdasarkan RTRW Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan .....	66
Tabel 3.1 Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok .....	71
Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan dalam RPJMD Kota Depok .....	71
Tabel 3.4 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok .....	73
Tabel 3.5 Arah Kebijakan dan Strategi Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok	74
Tabel 3.6 Penahapan Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok.....	76
Tabel 4.1 Draft Rancangan Akhir RPJMD Kota Depok Tahun 2025 - 2029.....	79
Tabel 4.2 Teknis Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok .....	81
Tabel 4.3 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok .....	87
Tabel 4.4 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan .....	91
Tabel 4.5 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	98
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Depok yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	101
Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Kota Depok .....	102
Tabel 4.8 Kinerja Renstra Urusan Perhubungan .....	103

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Depok.....	13
Gambar 2. 2 Diagram Struktur Organisasi Dinas Perhubungan .....	18
Gambar 2. 3 Perbandingan Jumlah ASN dan Non ASN .....	19
Gambar 2.4 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Dishub dengan Visi dan Misi RPJMD .....	47
Gambar 2.5 Permasalahan Transportasi di Kota Depok.....	58
Gambar 3.1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra .....	71
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perhubungan.....	77
Gambar 4.2 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra.....	78



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh suatu organisasi/lembaga untuk menetapkan strategi dan arah kebijakan, serta berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya, baik berupa modal maupun tenaga kerja, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2025-2029 dilatar belakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Depok. Sebagai salah satu unsur Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Depok berkewajiban menyiapkan Renstra yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi Pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Perencanaan strategis adalah proses yang sangat rumit dan kompleks yang membawa organisasi ke wilayah yang belum pernah dipetakan. Perencanaan strategis bukanlah resep sukses yang siap saji, sebaliknya perencanaan strategis membawa organisasi dalam sebuah perjalanan dan memberika kerangka panduan untuk menjawab berbagai pertanyaan dan menyelesaikan masalah. Kunci keberhasilannya adalah menyadari bahwa ada potensi masalah dan bersiap diri untuk menghadapinya. Perencanaan strategis merupakan suatu proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis (Bappenas, 2000). Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok tahun 2025-2029. Perubahan target indikator kinerja daerah yang disesuaikan dengan adanya pemberlakuan nomenklatur perangkat daerah baru, menuntut setiap perangkat daerah menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang berdasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2025-2029 yang disusun berdasarkan substansi kebijakan, program dan indikator kinerja kunci daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029, merupakan dasar dan pedoman dalam perencanaan dan pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok untuk tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Depok. Dinas Perhubungan Kota Depok memiliki peran strategis dalam bidang transportasi dan harus mampu meningkatkan kelancaran dan keselamatan transportasi dalam rangka menciptakan transportasi Kota Depok yang nyaman sebagai implementasi visi Kota Depok yaitu ***Bersama Depok Maju***.

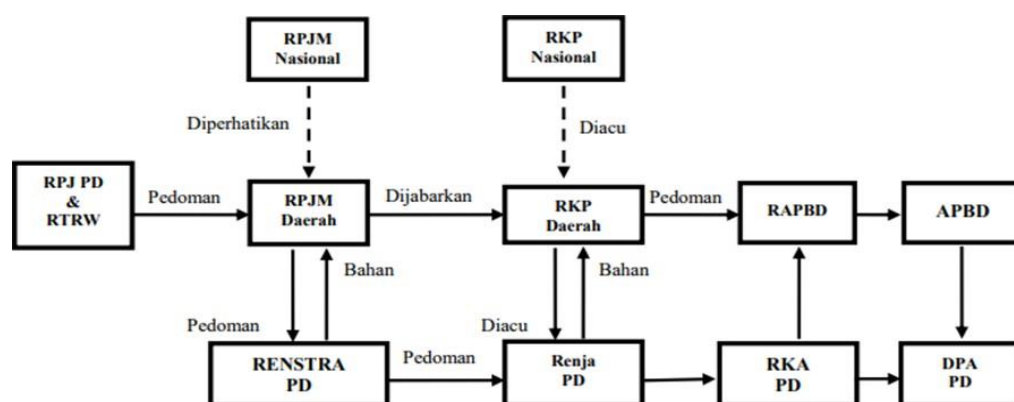
Pembangunan infrastruktur Perhubungan juga mempunyai peran dalam mengatasi kesenjangan sosial dan eksklusi sosial dengan cara menjadikan kelompok tertentu sebagai prioritas sehingga terbentuk keadilan gender, disabilitas, inklusi sosial (*Gender Equity, Disability, and Social Inclusion/GEDSI*). Pembangunan infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur yang dapat diakses dan memiliki fasilitas ramah bagi perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas. Hal ini selaras dengan tujuan global dan Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu pada Goal 5, mencapai kesetaraan gender; Goal 9, industri, inovasi, dan infrastruktur; Goal 10 berkurangnya kesenjangan; Goal 11 kota dan pemukiman yang berkelanjutan; dan Goal 13 penanganan perubahan iklim.

Sektor transportasi merupakan sektor ekonomi yang mencakup semua kegiatan terkait pergerakan orang, barang dan jasa. Suatu daerah dikatakan berkembang dan bertumbuh dengan baik jika didukung oleh transportasi yang baik. Depok merupakan sebuah kota yang memiliki posisi yang sangat strategis berada di poros Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Dari posisi ini menjadikan Depok sebagai kota yang menarik untuk berinvestasi dan bermukim sehingga menyebabkan dampak lain yang ditimbulkan yaitu masalah transportasi antara lain kemacetan lalu lintas. Sesuai dengan misi ke 2 yaitu Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Maju dan Ramah Lingkungan dengan sasaran ke 1 Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah.

Transportasi tidak dapat dilihat secara parsial atau sektoral semata dalam perencanaan dan penanganannya. Sebagaimana transportasi yang menghubungkan satu sama lain, maka urusan transportasi atau perhubungan harus dilakukan kerjasama yang baik dengan semua pihak yang terlibat dalam urusan perencanaannya.

Partisipasi sektor transportasi juga diharapkan dalam mengupayakan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hal tersebut seiring dengan Perubahan Iklim Global yang disebabkan oleh banyaknya GRK yang terperangkap di atmosfer sehingga mengakibatkan pemanasan global. Upaya peningkatan kualitas pelayanan transportasi dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain masih diperlukannya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Kota Depok untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi, masih diperlukan peningkatan keselamatan perjalanan transportasi utamanya peningkatan pemenuhan fasilitas keselamatan di ruas jalan Kota Depok, masih diperlukannya peningkatan layanan angkutan umum utamanya untuk angkutan perkotaan dan angkutan aglomerasi, serta penyediaan simpul transportasi khususnya terminal tipe C yang secara bertahap harus dipenuhi.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Depok juga memperhatikan keselarasan dengan Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2012–2032 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).–Untuk melihat keterkaitan Renstra secara jelas dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



**Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lain**

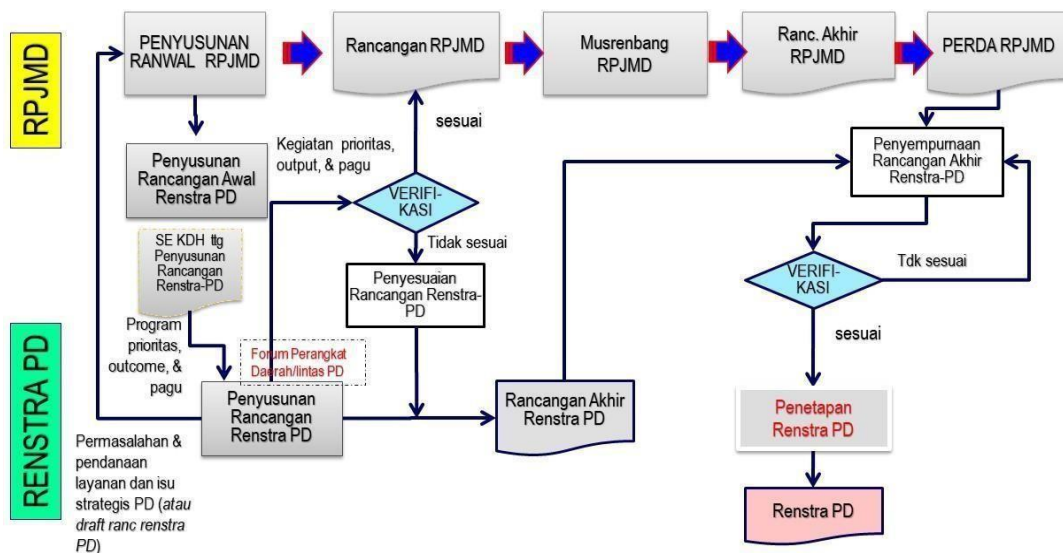
*Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2025 – 2029 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan bidang perhubungan yang terjadi di Kota Depok. Rumusan permasalahan perhubungan diperoleh

dari *Focussed Group Discussion (FGD)* yang dikumpulkan oleh anggota tim penyusun Renstra Dinas Perhubungan. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan Persiapan Penyusunan Renstra, Penyusunan rancangan awal, Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah,

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dan Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Mengingat peran dan fungsi Renstra Perangkat Daerah Kota Depok sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat maka penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan kembali secara lebih teknis di Rencana Kerja (RENJA) Dinas. Renja ini yang nantinya akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dimana RAPBD juga harus berpedoman pada RKPD Kota Depok yang kemudian RAPBD disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada akhirnya, penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang dapat mencerminkan kebutuhan pembangunan sektor transportasi dan perhubungan sebagai bagian dari skenario pembangunan Kota Depok secara keseluruhan. Renstra ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi penyusunan program-program sektor bidang perhubungan, dan menjadi dasar perencanaan pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Depok



**Gambar 1.2 Bagan Alur Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah**

## 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok tahun 2025-2029 dilakukan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum, perundang-undangan, dan peraturan pendukung lainnya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

- Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Tahun 2019 Nomor 187);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan

- Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
  20. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
  21. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
  22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang SPM Bidang Perhubungan;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
  28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  29. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan

- Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
30. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor x Tahun 20xx Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2025-2029; (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 20xx Nomor x).
  31. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
  32. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011);
  33. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok.
  34. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 9).
  35. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 12);
  36. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2025-2045;
  37. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat: ( 1/6/2020))
  38. Peraturan Walikota Depok Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan susunan organisasi UPTD Penerangan Jalan umum Kelas A pada Dinas Perhubungan
  39. Peraturan Walikota Depok Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan susunan organisasi Pengelolaan Terminal Kelas A pada Dinas Perhubungan
  40. Peraturan Walikota Depok Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan susunan organisasi UPTD Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kelas A pada Dinas Perhubungan
  41. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
  42. Peraturan Walikota Depok Nomor 28 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi UPTD Penerangan Jalan Umum Kelas A pada Dinas Perhubungan;
  43. Peraturan Walikota Depok Nomor 29 tahun 2018 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Terminal Kelas A pada Dinas Perhubungan;

44. Peraturan Walikota Depok Nomor 30 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A pada Dinas Perhubungan;
45. Peraturan Walikota Depok Nomor 79 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
46. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 Maksud**

Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok tahun 2025–2029 dimaksudkan menentukan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh aparatur serta stakeholder Dinas Perhubungan dan sebagai upaya untuk memberikan gambaran rencana tindakan dan kegiatan mendasar dengan berbagai analisis faktor – faktor internal maupun eksternal. Selain itu juga sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi pemerintahan daerah khususnya di bidang perhubungan guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Depok dalam 5 (lima) tahun ke depan.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2025–2029 yaitu :

- a. Menjabarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2025-2029, serta menetapkan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Depok dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode 2025-2029;
- b. Merumuskan arah kebijakan, strategi, program jangka menengah yang mengandung tujuan, sasaran, output, outcome dan indikator yang spesifik dan memiliki target yang terukur, supaya memudahkan didalam menilai kinerja Dinas Perhubungan.
- c. Merumuskan kebijakan penganggaran sebagai Dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2025, 2026, 2027, 2028, dan 2029;

- d. Mengidentifikasi kendala/hambatan dan kelemahan serta potensi dalam pencapaian tujuan Dinas Perhubungan
- e. Memudahkan didalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun eksternal Dinas Perhubungan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan Dinas Perhubungan
- f. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Perhubungan Kota Depok baik tahunan maupun periode jangka menengah (2025-2029).

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok tahun 2025-2029 ini disusun sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan Renstra dan peraturan perundangan terkait yang menjadi landasan hukum. Pada bab ini digambarkan pula maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2025 -2029.

##### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat gambaran pelayanan dan identifikasi permasalahan serta isu strategis yang dihadapi Perangkat Daerah. Bagian gambaran pelayanan mencakup tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, serta kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah yang dilengkapi informasi tambahan sesuai karakteristik daerah. Sementara itu, bagian permasalahan dan isu strategis membahas permasalahan dalam pelayanan serta isu strategis yang memengaruhi pencapaian tujuan dan target kinerja Perangkat Daerah.

##### **BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, sebagai landasan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Dalam bab ini dijelaskan tujuan yang akan dicapai dalam periode perencanaan lima (5) tahun, serta sasaran sebagai penjabaran dari tujuan yang lebih spesifik. Selanjutnya, bab ini juga menguraikan strategi Perangkat Daerah sebagai pendekatan atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, disertai dengan arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah serta rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

**BAB IV: PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat tentang uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator, target dan pagu indikatif dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Depok Tahun 2025-2029.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini memuat tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian serta evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan urusan Perhubungan.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK

#### 2.1 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

##### 2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok. Dalam peraturan tersebut disebutkan Dinas Perhubungan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan. Selanjutnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, diatur dalam Peraturan Walikota Depok nomor 79 tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan Kota Depok mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
  - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
  - c. Sub. Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Lalu Lintas membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
  - a. Seksi Prasarana Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan; dan
  - b. Seksi Perencanaan, Analisis dan Pengembangan Lalu Lintas
4. Bidang Angkutan membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:

- a. Seksi Angkutan Penumpang Dalam Kota; dan
  - b. Seksi Angkutan Lintas Batas.
5. Bidang Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
- a. Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Perparkiran; dan
  - b. Seksi Keselamatan dan Pengawasan Lalu Lintas.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
- 1) UPT Penerangan Jalan Umum
  - 2) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
  - 3) UPT Terminal
7. Kelompok Jabatan Fungsi

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
 NOMOR 79 TAHUN 2021  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA CARA KERJA DINAS PERHUBUNGAN



**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Depok**

*Sumber : Lampiran Perwal Kota Depok Nomor 79 Tahun 2021*

**KEPALA DINAS**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan, merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan di bidang teknis meliputi bidang lalu lintas, bidang bimbingan keselamatan dan ketertiban, bidang angkutan dan unit pelaksana teknis dinas;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian serta penyelarasan penyelenggaraan sistem transportasi kota;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya ; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

### **SEKRETARIS DINAS**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas, yang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
- b. Penghimpunan dan pengolahan data, dan penyusunan Renstra Dinas;
- c. Penyelenggaraan administrasi umum;
- d. Penyusunan evaluasi dan laporan;
- e. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah sekretariat;
- f. Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariat;
- g. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- h. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- i. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, asset Dinas dan pengkoordinasian perencanaan dinas;

- j. Pengelola keuangan Dinas;
- k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat ;
- l. Pengoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

### **BIDANG LALU LINTAS**

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas. Bidang Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Lalu Lintas mengacu pada rencana strategis Dinas;
- b. Perumusan bahan kebijakan teknis di bidang lalu lintas pelaksanaan penyelenggaraan dan pelayanan di bidang lalu lintas dan perkeretaapian kota;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan Bidang Lalu Lintas;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas;
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Lalu Lintas terdiri dari :

- a. Seksi Prasarana Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan;
- b. Seksi Perencanaan, Analisis dan Pengembangan Lalu Lintas

### **BIDANG ANGKUTAN**

Bidang angkutan mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan perhubungan di bidang angkutan. Bidang angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Angkutan mengacu pada rencana

- strategis Dinas;
- b. Perumusan bahan kebijakan teknis di bidang angkutan;
  - c. Pelayanan dan penyelenggaraan angkutan dan/atau barang;
  - d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Bidang Angkutan;
  - e. Pembinaan teknis penyelenggaraan terminal dan pengujian kendaraan bermotor;
  - f. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Angkutan Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Angkutan terdiri dari :

- j. Seksi Angkutan Penumpang Dalam Kota;
- k. Seksi Angkutan Lintas Batas.

### **BIDANG BIMBINGAN KESELAMATAN DAN KETERTIBAN**

Bidang bimbingan keselamatan dan ketertiban mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang bimbingan keselamatan dan ketertiban. Bidang Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang bimbingan keselamatan dan ketertiban mengacu pada Rencana Strategis Dinas;
- b. Perumusan bahan kebijakan teknis di bidang bimbingan keselamatan dan ketertiban;
- c. Penyelenggaraan bimbingan keselamatan dan ketertiban pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang bimbingan keselamatan dan ketertiban;
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban terdiri dari :

- a. Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Perparkiran
- b. Seksi Keselamatan dan Pengawasan Lalu Lintas.

### **UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)**

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang Perhubungan dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota tersendiri. Di Dinas Perhubungan terdapat 3 UPTD yaitu :

- a. UPT Penerangan Jalan Umum
- b. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
- c. UPT Terminal

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan Sebagian kegiatan Dinas secara professional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di Lingkungan Dinas. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional, diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## **2.1.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan**

### **2.1.2.1 Sumber Daya Manusia**

Dinas Perhubungan Kota Depok Provinsi Jawa Barat berlokasi di Jalan Perhubungan Nomor 50, Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis yang bergerak di bidang transportasi, memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Non ASN dengan jumlah seperti dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan**

<b>Tingkat Pendidikan Status Pegawai</b>	<b>S.2</b>	<b>S.1</b>	<b>DIPLOMA</b>	<b>SLTA</b>	<b>SLTP</b>	<b>SD</b>	<b>JUMLAH</b>
PNS	7	19	17	56	4	2	105
Non PNS	-	70	20	258	8	5	361

*Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok*

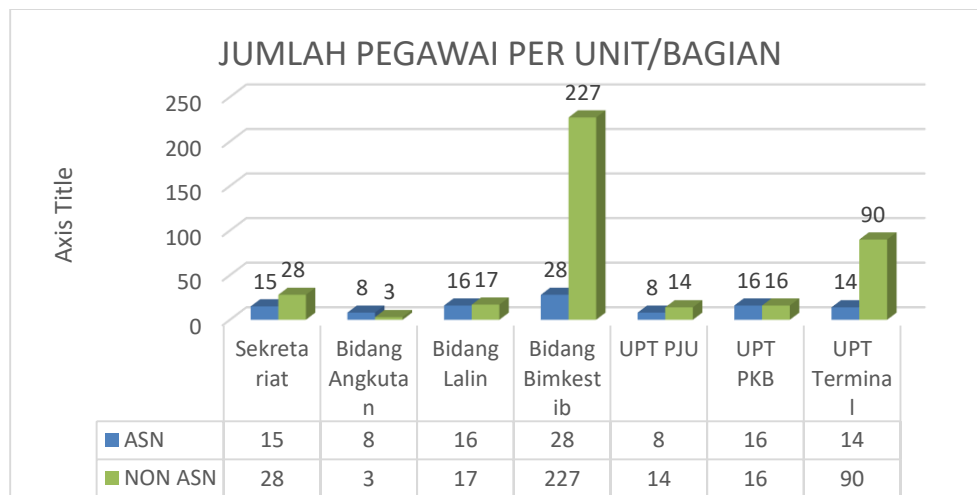
Dari tabel di atas dapat dilihat tingkat pendidikan yang terbanyak adalah SLTA baik dari PNS maupun Non PNS. Hal ini menjadi tugas Dinas Perhubungan dalam mendorong pegawai untuk terus

meningkatkan tingkat pendidikan dan pengetahuannya baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsi sehingga kinerja pegawai Dinas Perhubungan terus meningkat.

**Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Per Bagian/Seksi/Unit**

No	Unit Kerja	ASN	%	NON ASN	%	Jumlah	%
1	Sekretariat	15	14%	28	27%	43	41%
2	Bidang Angkutan	8	8%	3	3%	11	10%
3	Bidang Lalin	16	15%	17	16%	33	31%
4	Bidang Bimkestib	28	27%	193	53%	221	47%
5	UPT PJU	8	8%	14	13%	22	21%
6	UPT PKB	16	15%	16	15%	32	30%
7	UPT Terminal	14	13%	90	86%	104	99%
		105		361		466	

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok

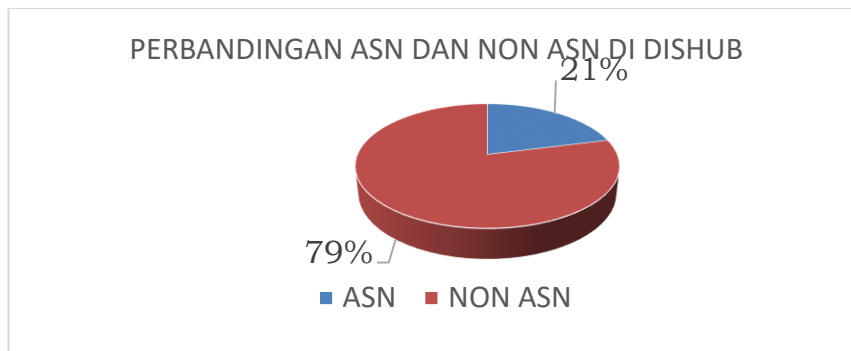


**Gambar 2. 2 Diagram Struktur Organisasi Dinas Perhubungan**

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok

Tabel dan grafik diatas menunjukkan distribusi jumlah pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Non-ASN di berbagai unit kerja. Secara umum, terlihat bahwa beberapa unit kerja memiliki proporsi pegawai Non-ASN yang jauh lebih tinggi dibandingkan ASN. Bidang Bimkestib

merupakan unit kerja dengan jumlah pegawai tertinggi secara keseluruhan, didominasi oleh Non-ASN sebanyak 193 orang, sementara ASN hanya berjumlah 28 orang.



**Gambar 2. 3 Perbandingan Jumlah ASN dan Non ASN**

*Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah non ASN lebih banyak dibanding dengan jumlah PNS. Hal ini karena untuk memenuhi kebutuhan pegawai terutama yang bersifat teknis dan petugas pengawas lalu lintas. Setiap tahun Dinas Perhubungan mengajukan formasi penambahan pegawai untuk memenuhi kebutuhan pegawai ke BKPSDM akan tetapi penambahan yang ada belum bisa menutup kebutuhan tersebut.

**Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Menurut Pangkat, Golongan dan Ruang**

Pangkat	Golongan	Ruang	Jumlah
Pembina Utama	IV	E	-
Pembina Utama Madya	IV	D	-
Pembina Utama Muda	IV	C	1
Pembina Tingkat I	IV	B	0
Pembina	IV	A	5
Penata Tingkat I	III	D	12
Penata	III	C	9
Penata Muda Tingkat I	III	B	11
Penata Muda	III	A	41
Pengatur Tingkat I	II	D	18
Pengatur	II	C	3
Pengatur Muda Tingkat I	II	B	3
Pengatur Muda	II	A	1
Juru Tingkat I	I	D	1
Juru	I	C	-
Juru Muda Tingkat I	I	B	-
Juru Muda	I	A	-

Jumlah PNS	105
------------	-----

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok

**Tabel 2.4 Sumber Daya Dinas Perhubungan**

Jenis Sumber Daya	Uraian	Kekuatan	Kelemahan	Rencana Penguatan
SDM	Jumlah ASN : 105	60% sesuai kompetensi	Kekurangan tenaga Tekhnis	Pelatihan % Rekrutmen
Keuangan	APBD 2025 : Rp. 105.939.776.376	Teralokasi untuk kegiatan prioritas	Penyerapan tidak sesuai dengan angkas	Penguatan Perencanaan
Sarpras	3 gedung, 57 kendaraan	Memadai untuk Operasional	Perlu Renovasi gedung	Pengajuan DAK Fisik
Tehnologi Informasi	SIPD, Simdishub	Simplifikasi Pelayanan Dishub	Pengguna belum terbiasa secara elektronik	Pengembangan SPBE dan Penguatan sosialisasi

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok

#### 2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Dinas Perhubungan Kota Depok adalah Gedung kantor yang berada di Jalan Perhubungan No. 30 Cilodong, Kendaraan Dinas sebanyak 46 Unit, 2 unit bangunan kantor untuk UPT. PJU dan UPT.PKB; Ruang Rapat 1 unit. Untuk menertibkan administrasi pengelolaan barang dan jasa, seluruh barang inventaris telah di inventarisir dan tercatat dalam Kartu Inventaris Barang SIPKD Modul Aset Dinas Perhubungan Kota Depok.

**Tabel 2.5 Daftar Kendaraan Dinas Perhubungan Tahun 2025**

NO.	JENIS KENDARAAN	MERK/TYPE	NO POLISI	TAHUN PEROLEHAN
1	2	3	4	5
1	Truck Crane	Toyota/Dyna Long	B 9163 UQ	2004
2	Truck + Attachment	Toyota/DYNA 240	B 9172 UQ	2005
3	Ligh Truck	Toyota/DYNA LT 125 PS	B 9192 UQ	2006
4	Pick Up	Toyota/Hilux	B 9246 UQ	2010
5	Truck Crane	Hino /Tronton Crane	B 9253 UQ	2011
6	Mini Bus	Toyota Avanza	B 1062 EQN	2011
7	Truck Crane	Hino	B 9012 ZOQ	2014
8	Jeep	Kia Sportage	B 1004 ZQH	2014

<b>NO.</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>	<b>MERK/TYPE</b>	<b>NO POLISI</b>	<b>TAHUN PEROLEHAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
9	Mini Bus	Isuzu Turbo Ls	B 1032 ZQN	2014
10	Mini Bus	Isuzu Turbo Ls	B 1033 ZQN	2014
11	Station Wagon	Toyota Rush	B 1049 ZQN	2014
12	Station Wagon	Toyota Rush 1.5s At	B 1093 ZQN	2015
13	Pick Up	Toyota Hilux	B 9056 ZTA	2019
14	Mini Bus	Suzuki Grand Vitara	B 1012 ZQH	2016
15	Pick Up	Toyota Hilux	B 9041 ZTA	2016
16	Pick Up	Nissan Double Cabin	B 9015 ZSC	2016
17	Truck Crane	Hino/ WU342R-H	B 9005 ZJA	2016
18	Truck Crane	Isuzu Crane PJU	B 9006 ZJA	2017
19	Truck Crane	Hino Light Truck	B 9056 ZOQ	2019
20	Station Wagon	Nissan All new Livina	B 1214 ZQN	2020
21	Station Wagon	Nissan All new Livina	B 1216 ZQN	2020
22	Mini Bus	Isuzu Nlr 55b Lx	B 7022 EPA	2022
23	Mobil Patroli	Honda HRV	B 1144 EQN	2022
24	Mobil Patroli	Honda HRV	B 1146 EQN	2022
25	Mobil Patroli	Honda HRV	B 1233 ZQA	2024
26	Truck + Attachment	Isuzu Elf	B 9008 EGA	2024
27	Truck Crane	Isuzu Crane PJU	B 9086 ZTA	2024
28	Sepeda Motor	Honda Supra Fit	B 3586 UQ	2003
29	Sepeda Motor	Honda Supra Fit	B 3645 UQ	2004
30	Sepeda Motor	Suzuki Smash	B 3719 UQ	2005
31	Sepeda Motor	Kawasaki /BR 200 A (CBU)	B 6147 ZQA	2013
32	Sepeda Motor	Honda Tiger	B 3969 UQ	2008
33	Sepeda Motor	Kawasaki/Ninja	B 6273 ZQA	2014
34	Sepeda Motor	Kawasaki/Ninja	B 6274 ZQA	2014
35	Sepeda Motor	Honda / Blade	B 6217 ZQA	2014
36	Sepeda Motor	Honda / Blade	B 6218 ZQA	2014
37	Sepeda Motor	Suzuki/Inazumi	B 6272 ZQA	2014
38	Sepeda Motor	Yamaha Xeon	B 6333 ZQA	2015
39	Sepeda Motor	Yamaha Nmax	B 6459 ZQA	2016

<b>NO.</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>	<b>MERK/TYPE</b>	<b>NO POLISI</b>	<b>TAHUN PEROLEHAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
40	Sepeda Motor	Yamaha Nmax	B 6460 ZQA	2016
41	Sepeda Motor	Yamaha Nmax	B 6461 ZQA	2016
42	Sepeda Motor	Yamaha Nmax	B 6462 ZQA	2016
43	Sepeda Motor	Honda New Beat Esp Cw	B 6495 ZQA	2016
44	Sepeda Motor	Honda New Beat	B 6499 ZQA	2016
45	Sepeda Motor	Yamaha Nmax	B 6612 ZQA	2019
46	Sepeda Motor	Yamaha Nmax	B 6613 ZQA	2019
47	Sepeda Motor	Yamaha Nmax	B 6614 ZQA	2019
48	Sepeda Motor	Yamaha Nmax	B 6615 ZQA	2019
49	Sepeda Motor	Yamaha Nmax	B 6623 ZQA	2020
50	Sepeda Motor	Yamaha Nmax	B 6627 ZQA	2020
51	Sepeda Motor	Yamaha Nmax	B 6629 ZQA	2020
52	Sepeda Motor	Yamaha Nmax	B 6630 ZQA	2020
53	Sepeda Motor	Yamaha Nmax	B 6632 ZQA	2020
54	Sepeda Motor	Kawasaki LX150H	B 6655 ZQA	2021
55	Sepeda Motor	Kawasaki LX150H	B 6656 ZQA	2021
56	Sepeda Motor	Kawasaki LX150H	B 6657 ZQA	2021
57	Sepeda Motor	Kawasaki LE650H	B 6686 ZQA	2023

*Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok*

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah kendaraan di Dinas Perhubungan cukup banyak akan tetapi belum bisa memenuhi semua kebutuhan operasional. Kendaraan yang dibutuhkan mendesak yaitu mobil derek, mobil crane baik untuk kebutuhan pelayanan PJU maupun perlengkapan jalan lainnya, mobil pickup untuk operasional bidang lalu lintas dan bimkestib serta bis sekolah untuk layanan angkutan anak sekolah di Kota Depok.

Dalam pelaksanaan layanan, Dinas Perhubungan memiliki kelompok layanan adalah masyarakat yang ada di Kota Depok, sedangkan layanan yang diberikan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Nomor: 551/111/SK/KPTS/DISHUB/XII/2024 tentang standar pelayanan lingkup Dinas Perhubungan Kota Depok sebagai berikut:

1. KIR
2. Derek

3. Laporan PJU
4. Ramp Check
5. Parkir Liar

**Tabel 2.6 Fasilitas Perlengkapan Jalan**

NO.	JENIS PERLENGKAPAN JALAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Rambu Standar Ukuran 60	323	356	396	506	581	631	731
2	Rambu RPPJ	55	55	73	91	91	91	91
3	Rambu Standar Ukuran 75	40	40	85	125	125	155	180
4	Traffic Light	8	9	12	13	14	14	14
5	Warning Light	17	17	17	23	27	33	33
6	CCTV	10	18	27	60	62	71	81
7	Cermin	32	46	94	162	242	342	422
8	Halte	45	48	48	49	49	51	47
9	PJU	707	119	638	890	2559	1500	768
10	Guadrail (meter)	469	469	585	585	585	585	585
11	Marka (m2)	3.556	2.968	4.471	6.581	10.522	12.492	15.080
12	RHK (Lokasi)	4	4	4	8	12	14	16
13	ZOSS (Lokasi)	14	18	18	28	38	48	52
14	Rumble Strip (Tidak ada Base Data)	-	-	-	-	-	-	-
15	Separator**)	1.158	-	1.503	2.110	3.942	1.970	2.000
16	JPO	5	5	6	6	6	6	6
17	Pelican Crossing Light	2	2	3	3	3	3	3

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok

**Tabel 2.7 Kebutuhan Perlengkapan Jalan di Kota Depok**

NO	JENIS PERLENGKAPAN JALAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	GAP
1	Rambu Standar Ukuran 60	1.149	731	418
2	Rambu RPPJ	136	91	45
3	Rambu Standar Ukuran 75	287	180	107
4	Traffic Light	20	14	6
5	Warning Light	77	33	44
6	CCTV	150	81	69

7	Cermin	878	422	456
8	Halte	-	47	47
9	PJU	23181	15572	7609
10	Guadrail (meter)	685	585	100
11	Marka (m2)	25.606	15.080	10.526
12	RHK (Lokasi)	20	16	4
13	ZOSS (Lokasi)	72	52	20
14	Rumble Strip (Tidak ada Base Data)	-	-	-
15	Separator**)	25.000	15.000	10.000
16	JPO	8	6	2
17	Pelican Crossing Light	10	3	7

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok

**Tabel 2.8 Kondisi Perlengkapan Jalan di Kota Depok**

NO	JENIS PERLENGKAPAN JALAN	JUMLAH	KONDISI		PERSENTASE BAIK(%)
			BAIK	PERLU PERBAIKAN	
1	Rambu Standar Ukuran 60	731	512	219	70,04%
2	Rambu RPPJ	91	60	31	65,93%
3	Rambu Standar Ukuran 75	180	126	54	70,00%
4	Traffic Light	14	8	6	57,14%
5	Warning Light	33	24	9	72,73%
6	CCTV	81	52	29	64,20%
7	Cermin	422	325	97	77,01%
8	Halte	47	33	14	70,21%
9	PJU	7178	6352	826	76,90%
10	Guadrail (meter)	585	293	292	50,09%
11	Marka (m2)	15.080	7.246	7.834	48,05%
12	RHK (Lokasi)	16	11	5	68,75%
13	ZOSS (Lokasi)	52	36	16	69,23%
14	Rumble Strip (Tidak ada Base Data)	-	-	-	-
15	Separator**)	20.000	9.700	10.300	48,50%
16	JPO	6	4	2	66,67%
17	Pelican Crossing Light	3	-	-	0,00%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok

**Tabel 2.9 Rekapitulasi Jumlah Moda Angkutan Berdasarkan Jenis**

No	Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor - Mobil Penumpang	Jumlah Kendaraan Bermotor - Bus	Jumlah Kendaraan Bermotor - Truk	Jumlah Kendaraan Bermotor - Sepeda Motor	Jumlah Kendaraan Bermotor - Jumlah
1	2018	189,503	792	19,919	966,451	1,176,665
2	2019	194,251	807	19,895	981,577	1,196,530
3	2020	184,159	767	18,969	931,338	1,135,233
4	2021	186,204	727	18,961	919,479	1,125,371
5	2022	192,821	698	19,252	926,839	1,139,610
6	2023	192,821	698	19,245	926,839	1,139,603
7	2024	206,405	841	19,682	973,220	1,200,148

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok

**Tabel 2.10 Kinerja Angkutan Dalam Kota Rata – Rata Tahun 2024**

No.	Trayek	Jumlah Armada	Aktif Operasi	Frekuensi	Headway	Load Factor
1	D.01	160	43	24	2,5	42%
2	D.02	570	85	45	1,3	60%
3	D.03	550	81	16	3,8	40%
4	D.04	170	43	10	6,0	40%
5	D.05	380	81	20	3,0	15%
6	D.06	305	59	13	4,7	25%
7	D.07	75	65	3	20,0	25%
8	D.08	60	17	3	18,5	20%
9	D.09	60	23	5	12,0	20%
10	D.10	81	25	6	10,4	28%
11	D.10A	145	25	4	14,5	75%
12	D.11	145	25	3	20,0	10%
13	107	115	14	3	20,0	30%
14	D.69	90	25	3	20,0	10%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok

Dalam mewujudkan transportasi yang nyaman, selain ditentukan dengan adanya angkutan publik yang baik, ditentukan pula kondisi lalu lintas yang lancar aman dan selamat. Faktor penentu keselamatan jalan ditentukan oleh 3 (tiga) faktor; (1) faktor sarana yakni kendaraan; (2) faktor prasarana yakni jalan dan fasilitas perlengkapan jalan dan; (3) faktor manusia yakni pengguna jalan.

Dari sisi sarana, upaya mewujudkan transportasi publik yang baik adalah dengan memperbaiki pelayanan angkutan umum, dimana dibutuhkan campur tangan Pemerintah Daerah dalam memastikan

keberadaan angkutan penumpang umum konvensional dapat hidup dan berjalan memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Dinas Perhubungan Kota Depok telah melakukan kajian rerouting trayek, kajian angkutan umum massal berbasis jalan dan angkutan umum massal berbasis rel, pemberian subsidi angkutan dan pemberian prioritas terhadap angkutan dalam pelaksanaan manajemen lalu lintas. Mekanisme pemberian subsidi termaksud menjadi amanat dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Subsidi angkutan berupa program *Buy The Service*. Selain itu diperlukan fasilitas umum pendukung pengguna angkutan perkotaan berupa trotoar yang nyaman untuk aksesibilitas, halte dan celukan bus guna keselamatan bagi penumpang dan operator angkutan.

Adanya fasilitas umum yang lengkap dan nyaman dapat memotivasi warga untuk mencoba layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Selain mewujudkan pelayanan angkutan publik yang baik, upaya lain dengan mewajibkan seluruh kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum melakukan uji KIR untuk mengetahui apakah kendaraan telah memenuhi persyaratan kelaikan jalan. Selain angkutan umum, beberapa jenis kendaraan juga wajib melakukan uji laik jalan, seperti kendaraan angkutan barang dan kendaraan besar. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala satu kali dalam 6 (enam) bulan. Data rekapitulasi jumlah kendaraan yang lulus uji dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2.11 Jumlah Uji KIR di Kota Depok**

<b>URAIAN</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Jumlah Kendaraan yang diuji KIR	20.842	21.418	20.050	20.197	18.734
Jumlah Kendaraan lulus uji KIR	19.962	480	18.517	19.591	18.646
Jumlah Kendaraan Tidak Lulus Uji KIR	880	21.814	1.533	606	273

*Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh kendaraan yang diuji KIR telah memenuhi persyaratan. Pada data di atas, hasil akhir semua kendaraan yang melakukan uji kir dinyatakan lulus meski ada beberapa yang sebelumnya diwajibkan melengkapi beberapa persyaratan yang menjadi syarat kelulusan. Setelah semua dilengkapi, maka kendaraan dinyatakan lulus. Dari data pada tabel di atas belum

semua kendaraan wajib uji yang terdaftar di Kota Depok melakukan uji berkala laik jalan di Kota Depok, ada yang memang kendaraan belum melakukan uji berkala dan juga ada kemungkinan kendaraan yang melakukan uji berkala di luar kota Depok (numpang uji). Pelaksanaan Pengujian Kendaraan bermotor juga harus ditunjang dengan Sarana pengujian yang baik dan peralatan pengujian kendaraan bermotor yang akurat.

Saat ini untuk sarana gedung pengujian kendaraan bermotor merupakan gedung lama dengan kondisi yang jauh dari layak, seperti kondisi bangunan gedung pengujian, Selain itu radius putar untuk jalur keluar kendaraan yang pendek sehingga menyulitkan untuk kendaraan uji yang memiliki dimensi lebar dan Panjang, kurangnya lahan parkir untuk kendaraan yang akan menguji Untuk peralatan pengujian yang digunakan di pengujian menggunakan peralatan yang setiap tahun dikalibrasi sehingga terjamin keakuratannya.

**Tabel 2.12 Alat Uji KIR di Kota Depok**

No.	Jenis Alat Uji	Merk	Tipe/Model	Nomor Seri
1.	Alat Uji Emisi CO/HC (Gas Analyzer)	Autonomous	Autogas1000	1001
2.	Alat Uji Ketebalan Asap (Smoke Tester)	Autonomous	Auto Smoke 4000P	1003
3.	Alat Uji Lampu Utama (Headlight Tester)	Autonomous	HL-150H	1005
4.	Alat Uji Rem (Brake Tester)	Autonomous	Auto-B-15 T	15-176
5.	Alat Uji Berat (Axle Load Tester )	Autonomous	Auto-B-15 T	15-176
6.	Alat Uji Penunjuk Kecepatan (Speedometer)	Autonomous	Auto-S-15T	15-180
7.	Alat Uji Kincup Roda Depan (Side Slip Tester)	Autonomous	Auto-A-15 T	15-176
8.	Alat Uji Tingkat Suara (Sound Level)	Tes	Test 1353	190205172
9.	Alat Uji Kegelapan Kaca (Tint Tester)	Edtn Tint Check Pro	TC3800	38.11156

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok

Dari tabel alat uji di atas dapat diketahui bahwa peralatan uji dalam kondisi baik dan akurat meskipun secara umur sudah cukup lama, padahal teknologi kendaraan terus berkembang pesat hal ini tidak sebanding dengan fitur yang ada pada peralatan uji saat ini yang ada di pengujian kendaraan bermotor. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan

bermotor juga harus ditunjang dengan Tenaga Penguji yang memiliki kompetensi yang telah ditentukan, berikut tabel data penguji kendaraan bermotor yang ada di Dinas Perhubungan Kota Depok.

**Tabel 2.13 Data Penguji Kendaraan Bermotor**

No.	Nama Penguji	NIP/Jabatan	Keterangan
1.	Budhi Santosa, A.Md	19811012 201403 1 001 Pengatur Tk.I, III/b	Penguji Kendaraan Bermotor Mahir
2	Asep Ahyadi	19691208 200701 1 019 Pengatur Tk.I, III/b	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana
3.	Dicky Senjaya, ST	Pengatur TK.I, III/b	Penguji Kendaraan Bermotor Mahir
4.	Eva Rakhmatika A, Ma.PKB	19911012 201403 2 002 Pengatur Tk.I, III/b	Penguji Kendaraan Bermotor Mahir
5.	Wahyono	19720219 200901 1 002 Pengatur, II/d	Penguji Kendaraan Bermotor Terampil
6.	Glen Firman Putra	19760518 201412 1 002 Pengatur Muda, II/c	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana
7.	Syifa Mashudi, A.Md PKB	19971016 202012 1 008 Pengatur, II/c	Penguji Kendaraan Bermotor Mahir
8.	Andriansyah Noer Rizki, A.Ma PKB	032.076.PT2.02.002	Penguji Kendaraan Bermotor Terampil
9.	Dina Ul Qayyimah, A.Ma.PKB	19990628 202503 2 010 Pengatur Musa Tk.I, III/d	Penguji Kendaraan Bermotor Terampil
10.	Mohammad Nugroho Ramadhani, A.Ma.PKB	19940308 202506 1 002 Pengatur Muda Tk.I, II/b	Penguji Kendaraan Bermotor Terampil

*Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok*

Dari data tenaga penguji kendaraan bermotor dilakukan pembagian pekerjaan menjadi dua untuk operator administrasi pengujian kendaraan bermotor dan operator teknis pengujian kendaraan bermotor. Dari data tabel jumlah kendaraan uji, tabel alat uji dan tabel data penguji dapat diketahui jumlah kendaraan yang melakukan uji rata rata 100 (seratus) kendaraan per hari Sistem pengujian kendaraan bermotor yang ada di Dinas Perhubungan pengujian kendaraan bermotor lain.

Kota Depok memiliki 6 Stasiun KRL (stasiun Universitas Indonesia, Stasiun Pondok Cina, Stasiun Depok Baru, Stasiun Depok Lama, Stasiun Citayam, Stasiun Pondok Rajeg), 1 Stasiun LRT Harjamukti, 1 Terminal Tipe A Jatijajar, 2 Terminal Tipe C (Terminal Margonda dan Terminal Tipe C Sawangan).

### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan**

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Depok pada Tahun 2020-2024 diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu :

1. 10 Indikator Kinerja Kunci (IKK);
2. Indikator Kinerja Utama (IKU).

Evaluasi pengukuran kinerja ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan di masa lalu sehingga bisa diperbaiki di masa yang akan datang. Capaian kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Depok selama beberapa tahun ke belakang dapat dilihat pada dibawah ini :

**Tabel 2.14 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2020 - 2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	Juta orang	21,6	18,5	29,6	36,9	46,32
2	Rasio izin trayek (nilai)	Poin	0.0021	0.00205	0.0023	0.0015	0.0015
3	Jumlah uji kir angkutan umum (unit)	KIR	10,421	10,949	10,025	10,099	9,367
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Terminal	2	2	2	2	2
5	Persentase layanan angkutan Angkutan Darat	%	0,03	0,07	0,01	0,08	NA
6	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	0,71	0,52	0,54	0,43	NA
7	Pemasangan Rambu-rambu	%	60,96	8,35	9,08	7,66	7,23
8	Rasio Panjang Jalan Per jumlah kendaraan	Point	0,0014	0,0013	0,0017	0,0016	0,0016
9	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Juta Orang	21,6	18,5	29,6	36,9	46,32
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	Juta Orang	4,4	3,8	3,8	4,1	3,25

*Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok, data telah diolah*

Dari tabel diatas dapat dilihat pencapaian kinerja Dinas Perhubungan di tahun tahun sebelumnya dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum yang mengalami penurunan secara signifikan yaitu pada tahun 2021. kondisi angkutan umum terjadi penurunan akibat adanya angkutan online yang semakin berkembang sehingga terjadi penurunan jumlah angkutan umum yang beralih ke angkutan online.

2. Rasio izin trayek

Rasio izin trayek menggunakan rumus jumlah izin trayek dibagi jumlah penduduk. Realisasi tidak ada gap yang signifikan karena target telah diperbaiki . Tahun 2023 dan tahun 2024 capaian rendah karena angkutan yang mengurus izin trayek semakin menurun seiring dengan perkembangan angkutan online.

3. Jumlah uji kir angkutan umum

Adalah jumlah kendaraan yang melaksanakan uji kir. Pada Tahun 2024 terjadi penurunan jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR, dikarenakan taxi dan angkutan umum banyak yang tidak beroperasi dan data PKB masih dalam tahap pemulihan dikarenakan proses konversi dari sub jenis kendaraan.

4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Kota Depok memiliki 6 Stasiun KRL (stasiun Universitas Indonesia, Stasiun Pondok Cina, Stasiun Depok Baru, Stasiun Depok Lama, Stasiun Citayam, Stasiun Pondok Rajeg), 1 Stasiun LRT Harjamukti, 1 Terminal Tipe A Jatijajar yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan, 2 Terminal Tipe C yang dikelola oleh Pemerintah Kota Depok (Terminal Margonda dan Terminal Tipe C Sawangan).

5. Persentase layanan angkutan darat

Terjadi kenaikan yang signifikan pada Tahun 2023

6. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum

Terjadi Penurunan pada tahun 2023 dari tahun-tahun sebelumnya

7. Pemasangan Rambu-rambu

Pemasangan rambu rambu ini sangat bergantung pada ketersediaan anggaran. Ada gap penurunan kinerja pada tahun 2023 dan Tahun 2024 disebabkan adanya refocusing/ pengurangan anggaran.

8. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan  
Realisasi capaiannya lebih dari 100% dengan rumus =  $\frac{\text{Jumlah angkutan darat}}{\text{Jumlah penumpang angkutan darat}} \times 100\%$ . Data jumlah angkutan darat diambil dr data Badan Pendapatan Daerah propinsi Jawa Barat.
9. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum  
Jumlah penumpang angkutan umum yang mengalami penurunan secara signifikan yaitu tahun 2020. Pada tahun tersebut masih menggunakan target Renstra periode sebelumnya yaitu 2016-2021 sedangkan kondisi angkutan umum sudah semakin turun akibat adanya angkutan online yang semakin berkembang sehingga terjadi penurunan jumlah angkutan umum yang beralih ke angkutan online.
10. Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/terminal per tahun  
Tidak ada gap yang tinggi antara target dan capaian kinerja. Jumlah penumpang yang melalui terminal juga meningkat dengan telah beroperasinya terminal jatijajar

**Tabel 2.15 Capaian Kinerja Pelayanan Indikator Kinerja Utama Urusan Perhubungan Tahun 2021 - 2024**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	10		
1	V/C Ratio				0,79	0,77	0,74	0,72	0,7	0,79	0,77	0,74	0,72	100	100	100	100
2	Moda Share				17,10	18	18,5	19	19,5	18,32	14,46	15,91	18,62	107,13%	86%	98%	98%
3	Nilai Sakip				70	70,25	70,50	71	71,5	68,50	69,95	70,50	71,40	97,85	99,57	100	100,56

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok, data telah diolah

Dari Tahun Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024, pencapaian kinerja V/C Ratio dapat dikatakan meningkat. V/C Ratio sampai saat ini masih dalam Tingkat Pelayanan Kategori C dengan Nilai 0,45-0,75. Nilai V/C Ratio dikatakan semakin baik apabila mendekati nilai 0 (Tingkat Pelayanan Kategori A dengan nilai 0,00-0,19)

Untuk Target Moda Share yang juga menjadi IKU Kota Depok capaian dari Tahun 2021-2024 mengalami penurunan di sebabkan kondisi jalan Kota Depok yang semakin padat sehingga titik Kemacetan semakin bertambah.

Sedangkan untuk Nilai SAKIP perbandingan 4 (empat) tahun terakhir 2021-2024 secara umum meningkat. Untuk tahun 2021 capaian terhadap target 97,85% , Tahun 2022 capain terhadap target 100%, Tahun 2023 tercapai 100% dan pada tahun 2024 melebihi 100% yaitu 100,56%.

Dari capaian indikator kinerja utama diatas dapat dievaluasi sebagai berikut :

### 1. Indikator kinerja V/C Ratio

Tingkat pelayanan jalan dapat diukur salah satunya dengan Volume Capacity Ratio (VC ratio) dengan rumus :

$$VCR = V/C$$

Keterangan :

- VCR : Volume kapasitas ratio (nilai tingkat pelayanan)
- V : Volume lalu lintas (smp/jam)
- C : Kapasitas ruas jalan (smp/jam)

Dinas Perhubungan pada tahun 2024, memiliki target V/C Ratio 0,72 realisasi 0,72 dengan capaian 100%. Realisasi tersebut didapat dari hasil kajian kinerja ruas yang rinciannya dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.16 Kinerja Ruas Jalan Tahun 2024**

No.	Nama Ruas	Co	FCw	FCsp	FCsf	FCcs	Volume (smp/jam)	Kapasitas Jalan (smp/jam)	V/C Ratio	LOS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Jl. Margonda Raya	3300	1,00	1,00	0,88	1,00	6.186	8.712	0,72	<b>C</b> (arus stabil, kecepatan dapat dikontrol oleh
2.	Jl. Raya Bogor	3300	0,92	1,00	0,88	1,00	4.222	5.344		
3.	Jl. Siliwangi	2900	1,14	1,00	0,82	1,00	1.545	2.710		
4.	Jl. Raya Sawangan	2900	1,08	1,00	0,90	1,00	2.480	2.818		
5.	Jl. Raya Parung	3300	0,92	1,00	0,92	1,00	4.301	5.586		
6.	Jl. Cinere	2900	1,25	1,00	0,95	1,00	2.824	3.444		
7.	Jl. Ir. Juanda	3300	1,30	1,00	0,97	1,00	5.659	7.349		

8.	Jl. Nusantara	2900	1,29	1,00	0,82	1,00	2.270	3.068	lalu lintas)
9.	Jl. Arif Rahman Hakim	3300	1,04	1,00	0,88	1,00	3.684	6.040	
10.	Jl. Komjen Pol Jasin	2900	1,34	1,00	0,86	1,00	2.540	3.342	
11.	Jl. Salak	3300	1,00	1,00	0,94	1,00	1.903	3.226	
12.	Jl. Tanah Baru	290 0	0,56	1,00	0,92	1,00	896	1.494	
13.	Jl. Pitara	290 0	0,56	1,00	0,92	1,00	1.150	1.494	
14.	Jl. Bungur	290 0	0,56	1,00	0,86	1,00	950	1.396	

Sumber : *Kajian Kinerja Ruas Jalan Dan Persimpangan Bidang Lalu Lintas 2024*

Pencapaian target indikator kinerja v/c ratio dilakukan dengan kolaborasi antara berbagai dinas, seperti Disrumkim Kota Depok, Dinas PUPR Kota Depok, Kementerian Perhubungan, Polres Metro Depok. Beberapa upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Telah beroperasinya BISKITA Trans Depok yang merupakan hasil MoU antara Pemerintah Kota Depok dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan melalui skema pembelian layanan/Buy The Service. BISKITA Trans Depok mengoperasikan 15 (lima belas) armada bus yang melayani 1 (satu) koridor yaitu Terminal Depok – Stasiun LRT Harjamukti PP sejauh 34 (tiga puluh empat) km dengan 44 (empat puluh empat) bus stop.
- b. Beroperasinya mikrotrans Depok jurusan Terminal Depok hingga Terminal Jatijajar dengan jumlah armada sebanyak 10 unit
- c. Adanya pengembangan infrastruktur dan teknologi *Integrated Area Sistem of Transportation Center (IAS-TC)* dalam pemantauan arus lalu lintas dan simpang yang dapat berfungsi dalam manajemen lalu lintas dengan mengkoordinasikan antar persimpangan dari pusat kontrol untuk mengatasi kepadatan arus lalu lintas di simpang melalui pengaturan siklus secara adaptif terhadap antrian dan tundaan.
- d. Pemasangan rambu dan marka yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas sehingga memperlancar arus lalu lintas. Dengan adanya rambu dan marka yang jelas dan sesuai standar, pengaturan lalu lintas akan menjadi lebih terorganisir, mengurangi kecelakaan dan membuat perjalanan menjadi lebih lancar.
- e. Pelaksanaan penertiban parkir liar pada bahu jalan atau badan jalan sehingga kapasitas jalan dapat dimaksimalkan, hambatan samping

dapat dikurangi dan mobilitas lalu lintas akan lebih efisien sehingga dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan di jalan.

- f. Tersedianya anggaran penyediaan perlengkapan jalan (rambu, marka dan PJU) yang berfungsi memberikan arah di ruas jalan serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan sehingga mengurangi hambatan di ruas jalan dan memperlancar arus lalu lintas.
- g. Adanya petugas pengawas arus lalu lintas yang membantu mengawasi arus lalu lintas dan melaporkannya sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.
- h. Adanya penertiban parkir liar di badan jalan bekerjasama dengan Polres Kota Depok untuk mengurangi hambatan samping di ruas jalan sehingga arus lalu lintas menjadi lebih lancar.

## **2. Indikator kinerja Moda Share**

Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan umum (Moda Share) yaitu dengan membandingkan jumlah perjalanan menggunakan angkutan umum per hari dengan total keseluruhan perjalanan per hari. Di Kota Depok dari tahun ke tahun semakin menurun jumlah penggunaan kendaraan umum. hal ini disebabkan beberapa hal yaitu :

- a. Revitalisasi dalam peremajaan angkutan umum belum terlaksana secara menyeluruh sehingga banyak angkutan umum belum memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Angkutan Umum yang layak, hal ini menyebabkan masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi untuk menunjang kegiatan sehari-hari daripada menggunakan angkutan umum sebagai moda transportasi utama.
- b. Adanya transportasi online yang memiliki keunggulan dalam ketepatan waktu tempuh, kenyamanan, kemudahan akses, cakupan layanan dan lain-lain menjadi pilihan alternatif Masyarakat dalam menggunakan transportasi umum. Hal ini pula yang menyebabkan banyak angkutan umum yang tidak beroperasi.
- c. Alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kota Depok Tahun 2024 untuk pengembangan transportasi dan peningkatan moda dan sarana transportasi umum yang layak saat ini masih belum menjadi prioritas.

Masalah kemacetan dan angkutan umum di Kota Depok memang menjadi PR yang berat untuk Pemerintah Kota Depok. Penggunaan pajak kendaraan Bermotor memang belum maksimal untuk pengembangan transportasi. Besarnya anggaran yang dibutuhkan sehingga harus mencari bentuk pendanaan di luar APBD Kota Depok. Salah satu bentuk pendanaan yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan adalah Subsidi *Buy The Service*, pada Tahun 2024 ini Kota Depok mendapat subsidi dari Kemenhub untuk 1 koridor.

Selain subsidi BTS, upaya peningkatan penggunaan angkutan umum juga didukung dengan telah beroperasinya LRT rute Harjamukti – Dukuh. Untuk mengakomodir dan memudahkan penumpang yang akan naik LRT, Dinas Perhubungan Depok menyiapkan feeder (angkutan penumpang) ke Stasiun LRT Harjamukti Cimanggis dan sedang dilaksanakan rerouting untuk mengevaluasi trayek-trayek yang dekat dengan stasiun LRT tersebut. Selain itu Dishub Depok juga berkoordinasi dengan badan hukum angkutan terkait penyediaan feeder. Untuk saat ini yang sudah beroperasi adalah angkutan D11 dengan rute Depok-BKN yang melewati Harjamukti dan Bis Kita Trans Depok. Diharapkan kedepan akan ada feeder lainnya untuk memudahkan layanan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum.

### 3. Indikator kinerja Nilai Sakip

Pada tahun 2024 Nilai Sakip Dinas Perhubungan telah mencapai target. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok tahun 2024 dari Inspektorat Daerah didapat nilai sebagai berikut :

**Tabel 2.17 Komponen Penilaian SAKIP**

NO.	KOMPONEN	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30%	19,80
2	Pengukuran Kinerja	30%	22,20
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	19,25
	<b>HASIL EVALUASI</b>	<b>100</b>	<b>72,80</b>
	<b>KATEGORI</b>		<b>BB</b>

Sumber : LHE Sakip oleh Irda tahun 2024

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Nlai Sakip, Dinas Perhubungan melakukan upaya diantaranya : Mendorong setiap unit kerja (bidang dan UPT) untuk terus melaksanakan perbaikan layanan dengan inovasi-inovasi terutama yang menggunakan teknologi informasi seperti perbaikan website Dishub, peningkatan penggunaan media sosial, pembangunan aplikasi seperti aplikasi layanan UPT PKB, database dan pengaduan UPT PJU, penertiban parkir, layanan derek, absen non PNS, sekretariat untuk perekaman notulen rapat dan administrasi SPPD, database angkutan dan lainnya.

**Tabel 2.18 Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2020 – 2024**

Uraian	Anggaratan Tahun ke					Realisasi Tahun ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke				Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4					Anggaran	Realisasi
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	(15)	(16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Belanja Operasi	75,057,179,320	75,523,679,400	75,123,061,198	75,907,533,937	104.881.846.376	68,043,340,767	69,578,087,405	70,069,856,837	72,337,879,630	90.66	92.13	93.27	95.30	0.38%	2.07%
Belanja Modal	7,157,102,400	30,444,596,540	11,445,825,040	8,428,783,400	1.054.920.000	5,519,736,196	27,573,557,876	10,532,426,160	8,204,199,844	77.12	90.57	92.02	97.34	-11.33%	-11.53%
Jumlah	82,214,281,720	105,968,275,940	86,568,886,238	84,336,317,337	105.936.766.376	73,563,076,963	97,151,645,281	80,602,282,997	80,542,079,474	89.48	91.68	93.11	95.50	-0.07%	1.60%

Sumber : Dinas Perhubungan tahun 2024

Dari tabel diatas bahwa realisasi anggaran secara keseluruhan mengalami kenaikan dimana tahun pertama Renstra rasio antara realisasi dan anggaran 89,48%, tahun kedua 91,68 dan tahun ketiga Renstra 93,11%, namun jika dilihat dari masing masing jenis belanja berfluktuasi, untuk belanja operasi dari tahun pertama sampai dengan tahun kedua mengalami peningkatan, tahun ketiga mengalami penurunan dan untuk belanja modal dari sisi jumlah anggaran meningkat di tahun kedua dan mengalami penurunan di tahun berikutnya dengan realisasi tahun pertama 77,12, tahun kedua dan seterusnya mengalami peningkatan.

Untuk rata pertumbuhan anggaran belanja operasi 0,38%, belanja operasi mengalami penurunan 2,07%. Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja operasi 2,07% dan rata-rata pertumbuhan belanja modal -11,53%.

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perhubungan**

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya perlu sinergitas dari berbagai unsur lembaga dan instansi yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dinas Perhubungan yang memiliki kewenangan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas memiliki mitra dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepolisian Resort Kota Depok, Jasa Raharja Dandim 0508 Depok. Dalam hal pengaturan trayek angkutan umum, Dinas Perhubungan melaksanakan tugas bermitra dengan ORGANDA. Disamping itu, juga ada perangkat daerah yang menjadi mitra terdekat dari Dinas Perhubungan yaitu DPUPR Kota Depok, Disrumkim Kota Depok, BAPPEDA Kota Depok dalam perencanaan, penganggaran dan pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan kelancaran, Satpol PP dalam kegiatan operasi di lapangan. Dinas Perhubungan juga terkait langsung dengan masyarakat, dalam pelayanannya baik uji kendaraan bermotor, penyediaan sarana angkutan umum, ataupun manajemen dan rekayasa lalu lintas.

#### **2.1.5 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan dan peluang pelayanan Dinas Perhubungan dalam 5 (lima) tahun mendatang (2025 – 2029) adalah sebagai berikut:

##### **Tantangan:**

- a. Terbatasnya kualitas, kuantitas, standar kompetensi SDM Transportasi.
- b. Keterbatasan alokasi anggaran. Kurang lebih 50% pagu anggaran dialokasikan untuk pembayaran rekening listrik PJU dan honor non ASN sehingga banyak perencanaan kegiatan yang tidak bisa terealisasi. Pajak Penerangan Jalan pun belum maksimal untuk pembiayaan PJU, begitu juga dengan pajak kendaraan bermotor masih sangat minim untuk pengembangan transportasi.
- c. Belum optimalnya sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan seperti crane, kendaraan operasional, kendaraan derek, ruang pelayanan UPT PKB dan lahan parkir PKB. Masih minimnya penggunaan teknologi dalam pelayanan perhubungan.
- d. Belum optimalnya Integrasi antar moda (kurangnya konektivitas) sehingga dapat mengefisiensikan biaya, tenaga dan waktu

- pengguna jasa transportasi.
- e. Kemacetan Lalu lintas dengan faktor yang mempengaruhi sebagai berikut :
- 1) Kinerja jaringan jalan, kapasitas jalan dan simpang kurang memadai. Tingginya volume lalu lintas tidak sejalan dengan kapasitas jalan yang ada. Hal ini disebabkan jumlah kendaraan yang semakin meningkat tidak diimbangi dengan penambahan ruas jalan. Tidak bertambahnya kapasitas jalan kemudian bertambahnya hambatan samping seperti parkir di badan jalan, kendaraan yang berhenti di badan jalan dan kendaraan lambat menyebabkan semakin turunnya kinerja suatu jalan.
  - 2) Maraknya transportasi online yang minim pengawasan dari pemerintah sehingga kinerja angkutan umum menurun. Dan juga pola hidup Masyarakat yang lebih senang menggunakan kendaraan pribadi.
  - 3) Transportasi publik kurang nyaman, sehingga tidak menjadi pilihan utama masyarakat. Perilaku pengguna jalan kurang tertib dan kurangnya fasilitas parkir. Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas.

**Peluang :**

Dari permasalahan yang ada maka peluang yang bisa diambil yaitu:

- a. Komitmen Kepala Daerah dalam mengatasi kemacetan di Kota Depok.
- b. Usulan anggaran ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta dan Pusat (Kementerian Perhubungan).
- c. Kolaborasi untuk mengintegrasikan perencanaan baik dari Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, BAPPEDA Kota Depok dan Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai Upaya mengurai kemacetan.
- d. Adanya Studi Kelayakan Pengembangan Transportasi Massal Berbasis Rel dalam Upaya pengembangan sistem angkutan umum masal (SAUM).
- e. Adanya Kerjasama dengan JRC dan JAC.
- f. Pemberian bantuan pelayanan angkutan umum, berupa *Buy The Service*

- g. Tersusunnya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rencana Induk Perkeretaapian sebagai dasar perencanaan pengembangan transportasi kedepan.
- h. Telah beroperasinya LRT Harjamukti untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum oleh masyarakat.
- i. Adanya RITJ (Rencana Induk Transportasi Jabodetabek) dari BPTJ yang dapat mendukung dan membantu pengembangan transportasi khususnya di Kota Depok.
- j. Rencana Pembangunan terminal Sawangan untuk meningkatkan konektivitas transportasi.
- k. Adanya manajemen rekayasa lalu lintas di beberapa ruas jalan untuk meningkatkan kinerja ruas jalan.
- l. Memiliki alat pemantau arus lalu lintas yang canggih yang dapat mengatur antrian dan tundaan di simpang simpang secara adaptif.

#### **2.1.6 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi pembangunan jangka pendek 2025-2029 Kota Depok yang diusung oleh Wali Kota terpilih adalah "**Bersama Depok Maju**"

Visi ini mencerminkan semangat kolaborasi dan inovasi dalam membangun Kota Depok agar lebih maju dalam berbagai aspek, dengan penekanan pada inklusivitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Sejarah Kota Depok memiliki keunikan tersendiri, sejak awal di Kota Depok telah hadir Masyarakat dari berbagai Suku, Bangsa dan Agama. Melihat hal tersebut, kami ingin merangkul semua elemen masyarakat yang ada di Kota Depok. Dan untuk itu kami hadirkan visi **Bersama Depok Maju. Maju**, mencerminkan kondisi Kota Depok yang modern, kreatif dan berdaya saing dengan sumber daya manusia yang produktif, infrastruktur yang ramah lingkungan, ekonomi yang kreatif berbasis teknologi, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Secara filosofis, visi "Bersama Depok Maju" mencerminkan semangat gotong royong dan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan visi jangka panjang Kota Depok yang mengedepankan tiga pilar utama.

a. Kolaborasi untuk Pembangunan Maju:

Visi kepala daerah terpilih menegaskan kolaborasi dalam menciptakan kota yang modern dan berdaya saing. Dengan mengadopsi pendekatan inovatif dalam setiap program pembangunan, Kota Depok dapat mempercepat transformasi menuju "Maju" sesuai dengan RPJPD.

b. Kesejahteraan Sosial:

Visi "Bersama Depok Maju" juga menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pilar "Sejahtera" dari RPJPD yang menargetkan peningkatan kualitas hidup warga melalui program-program sosial yang inklusif dan adil.

c. Keberlanjutan Lingkungan:

Pilar "Berkelanjutan" dalam RPJPD sangat relevan dengan Visi kepala daerah terpilih yang berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Ini mencakup pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana serta penerapan teknologi ramah lingkungan dalam setiap aspek pembangunan kota.

Sebagaimana penjabaran visi Kota Depok di atas disusunlah misi Pembangunan Kota Depok Tahun 2025 – 2029 dalam rangka mewujudkan visi “Bersama Depok Maju” dengan rincian sebagai berikut:

1. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia secara Inklusif
2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Maju dan Ramah Lingkungan
3. Pengembangan Ekonomi yang Kreatif Berbasis Teknologi
4. Peningkatan Transformasi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital

Secara operasional, visi "Bersama Depok Maju" dijabarkan ke dalam empat aspek utama:

1. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia secara inklusif:
  - a. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas Pendidikan;
  - b. Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas sarana prasarana pelayanan Kesehatan;
  - c. Terwujudnya kehidupan keluarga yang berkualitas dan masyarakat yang sejahtera;

- d. Meningkatnya kohesi sosial masyarakat.
2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Maju dan Ramah Lingkungan:
    - a. Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Antar Wilayah;
    - b. Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana Daerah dan Krisis Iklim;
    - c. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
    - d. Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman kota yang layak huni dan berkelanjutan.
  3. Pengembangan Ekonomi yang Kreatif Berbasis Teknologi:
    - a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan;
    - b. Menguatnya ekonomi sektor prioritas daerah berbasis teknologi;
    - c. Menurunnya angka pengangguran yang disertai peningkatan decent job;
    - d. Menurunnya tingkat kemiskinan.
  4. Transformasi Pelayanan Publik:
    - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola digital;
    - b. Meningkatnya pengembangan kerjasama lintas sektor di tingkat lokal, regional, nasional, dan Internasional;
  5. Jika mencermati misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah diatas dan mempertimbangkan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, maka Dinas Perhubungan lebih fokus kepada Misi 2 “Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Maju dan Ramah Lingkungan. Di dalam dokumen RPJMD Kota Depok 2025-2029, memiliki rincian penjabaran sebagai berikut:

**Tabel 2.19 Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025 – 2029**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan Konektivitas dan Akseibilitas antar wilayah melalui transportasi yang berkeselamatan	V/C Ratio	Meningkatnya Efisiensi waktu perjalanan secara aman dan berkelanjutan	Kecepatan Rata-Rata
		Meningkatkan kualitas pelayanan public dan tata kelola digital	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan

Sumber: Rancir RPJMD Tahun 2025 - 2029

Untuk mencapai sasaran tersebut Pemerintah Kota Depok menghadapi sejumlah isu. Isu-isu pembangunan yang teridentifikasi dalam dokumen RPJMD Kota Depok 2025 - 2029 yang terkait dengan indikator sasaran diatas, diurutkan dari skor tertinggi meliputi:

1. Pembentukan BUMD
2. Reformasi Birokrasi
3. Pengembangan kerja sama anatar daerah dan internasional
4. Optimalisasi pelayanan publik
5. Penambahan dan peningkatan kompetensi pegawai

Berikut ini program RPJMD Kota Depok 2021-2026 yang ditugaskan kepada Dinas Perhubungan.

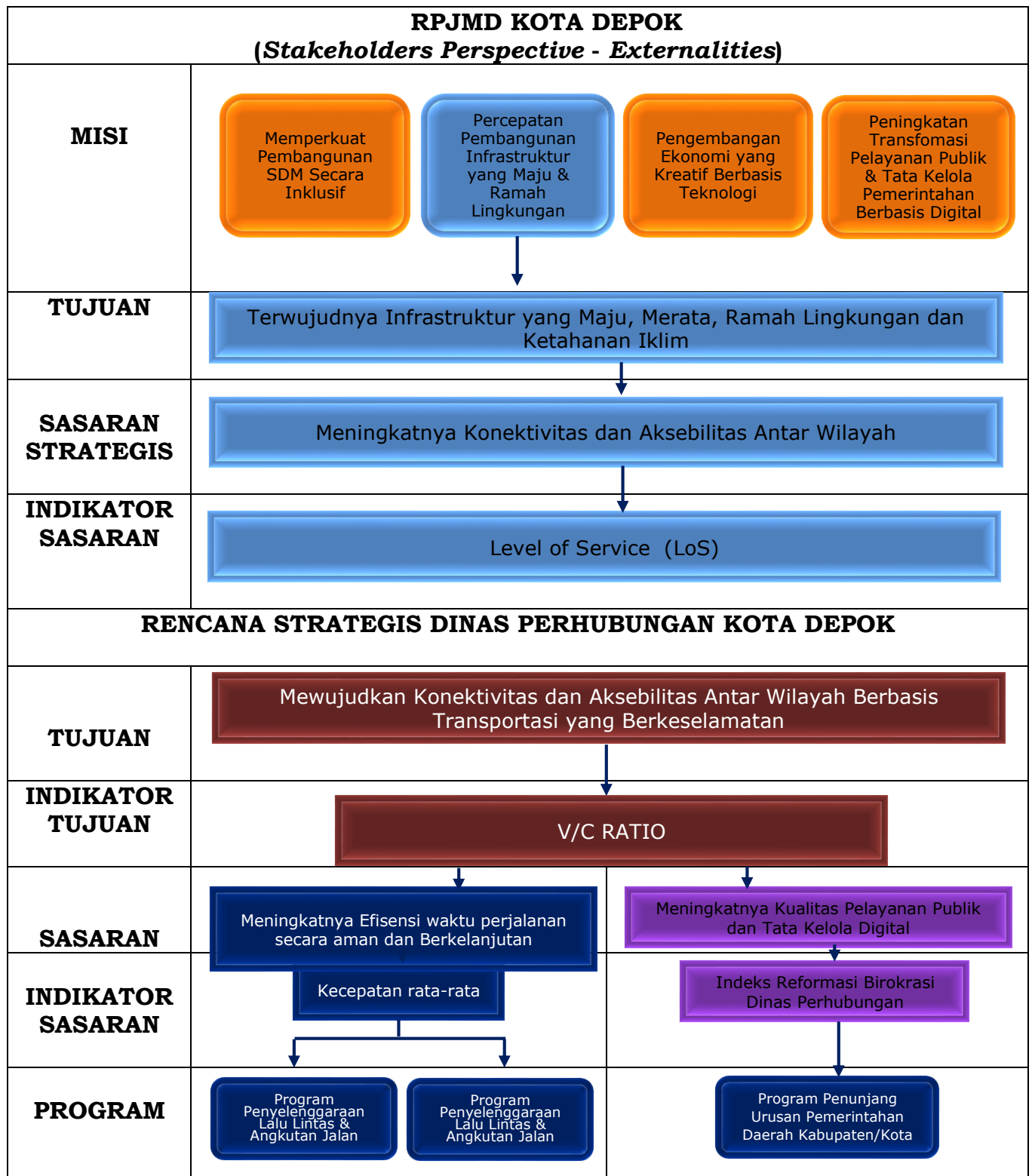
**Tabel 2.20 Draft Rancangan Akhir RPJMD Kota Depok Tahun 2025 – 2029**

Urusan / Program Outcome	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Peringkat Daerah	Nilai Sakip Dinas Perhubungan	Poin	71.40	71.50	23,203,007,396	72.00	27,544,043,545	72.50	30,298,447,900	73.00	32,105,303,341	73.50	36,661,121,959.00	74.00	40,327,234,155.00
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkut															

an Jalan (Laj)															
Meningkat nya Kualit as Laya nan Tran sport asi Dara t	Rasio Konektivit as Darat	Poin	0,61	0,615	82,72 8,008, 980.0 0	0,62	130,4 07,53 1,86 8.00	0,62	198,3 30,00 7,04 5.00	0,63	207,3 19,72 9,73 9.00	635	217,2 08,42 4,70 3.00	0,64	228,0 85,98 9,16 4.00
	Persentas e Kelengka pan Jalan Yang Telah Terpasan g Terhadap Kondisi Ideal	Persen	51,99	54,78		60,5 9		67,10		74,32	9,00	80,80	3,00	87,57	

Isu nasional yang akan mempengaruhi kinerja Dinas Perhubungan adalah salah satunya Bonus Demografi dimana Kota Depok memiliki posisi yang sangat strategis dalam konteks regional Jabodetabek, terletak diantara DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional, serta Kabupaten Bogor yang berkembang pesat. Letak geografis ini menjadikan Depok sebagai kota penyangga utama sekaligus jalur penghubung vital aktivitas komuter harian, perdagangan, serta mobilitas penduduk dan barang. Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan aksesibilitas yang terus berkembang, Depok berperan penting dalam mendukung fungsi kawasan metropolitan, terutama dalam penyediaan permukiman, layanan pendidikan tinggi, dan pengembangan sektor jasa. Kondisi ini menempatkan Depok pada posisi strategis sebagai simpul pertumbuhan baru yang memiliki potensi signifikan dalam mendorong konektivitas wilayah dan pemerataan pembangunan kawasan aglomerasi Jakarta.

RPJMD Provinsi Jawa Barat melalui misi ke 4 yaitu “Memperkuat transportasi birokrasi yang berorientasi terhadap mutu pelayanan public yang bermartabat, efektif, efisien menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih (Clean Government ) sejalan dengan Sasaran yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola digital”.



**Gambar 2.4 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Dishub dengan Visi dan Misi RPJMD**

*Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok*

### 2.1.7 Telaahan Keterkaitan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dengan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Kota Depok di

dalam dokumen Renstra ini yaitu adanya Keterkaitan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dengan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Depok sangat erat karena RTRW menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program Pembangunan di Kota Depok termasuk pelayanan transportasi dan lalu lintas yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Depok.

Keterkaitan RTRW dengan Pelayanan Dinas Perhubungan antara lain:

a. Perencanaan Infrastruktur Transportasi

RTRW Kota Depok 2022-2042 menjadi dasar dalam perencanaan infrastruktur transportasi, termasuk jaringan jalan, terminal dan fasilitas parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Depok.

b. Pengembangan Sistem Prasarana

RTRW juga mengatur pengembangan sistem prasarana untuk meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan dan meningkatkan keterhubungan dalam konteks nasional.

c. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Dengan adanya RTRW, Dinas Perhubungan Kota Depok dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, seperti penyediaan layanan derek gratis bagi kendaraan yang mengalami kendala di jalan.

d. Sinkronisasi Program

RTRW juga menjadi acuan dalam sinkronisasi program pembangunan antara sektor- sektor terkait termasuk transportasi dan infrastruktur untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pembangunan

### **2.1.8 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga**

Berdasarkan tema visi Indonesia Emas 2045, yakni untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, maka Kementerian Perhubungan memiliki Visi “Transportasi Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam mendukung visi tersebut Kementerian Perhubungan berpedoman pada 8 Asta Cita serta 17 Arah Pembangunan Nasional. Untuk mewujudkan visi tersebut Kementerian Perhubungan mempunyai 8 misi, yaitu:

1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan;

2. Mewujudkan dukungan transportasi terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;
6. Membangun transportasi kewilayahan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau;
7. Melanjutkan transformasi tata kelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional;
8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis sektor transportasi, permasalahan yang ada. Adapun tujuan pembangunan sektor perhubungan 2025-2029 sebagai berikut :

1. Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional RPJMN 2025-2029;
2. Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing;
3. Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas;
4. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.

#### **2.1.9 Telaah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat**

Selanjutnya Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, antara lain sebagai berikut:

- a. Tujuan : Terwujudnya Pelayanan transportasi yang berkelanjutan di Jawa Barat
- b. Sasaran : Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi di Jawa Barat
- c. Isu strategis : Belum Optimalnya Layanan Transportasi Jawa Barat

Hal ini berkaitan erat dengan isu transportasi di Kota Depok sebagai beranda Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta, mengingat banyaknya penduduk Depok yang beraktivitas di Provinsi DKI Jakarta yang umumnya disebut pekerja komuter yang kurang lebih sebanyak 399.268 orang (Maret, 2024 – Sumber Databoks Katadata). Untuk itu, diperlukan kolaborasi dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan transportasi.

Selain, itu transportasi antar kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kota Depok perlu menjadi perhatian, hal ini akan menunjang aktivitas perputaran ekonomi. Untuk itu, diperlukan perencanaan transportasi yang sejalan antara Kota Depok dengan Provinsi Jawa Barat

## **2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Perumusan isu strategis didasarkan pada analisis yang tajam terhadap berbagai faktor yang memengaruhinya. Tahapan ini berfungsi untuk menyaring berbagai permasalahan dan potensi menjadi beberapa isu prioritas yang akan menjadi fokus utama dalam periode Renstra. Analisis ini mempertimbangkan keselarasan antara kondisi internal Perangkat Daerah dengan arahan kebijakan global, nasional, dan regional. Di bawah ini menyajikan matriks identifikasi Isu Strategis Perangkat Daerah. Isu strategis dalam Renstra adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek.

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan**

Permasalahan Pelayanan pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.21 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan KLHS**

NO.	KLHS TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Belum Optimalnya layanan Infrastruktur Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih banyaknya titik – titik kemacetan</li> <li>Pengembangan transportasi publik belum memadai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kinerja ruas jalan masih rendah akibat kapasitas jalan kurang memadai, kapasitas simpang dengan radius tikung kurang memadai, banyaknya hambatan samping seperti banyaknya angkot dan ojol yang parkir di badan jalan, pkl di trotoar dan bahu jalan.</li> <li>Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan ruas jalan baru.</li> <li>Pembangunan tol baru yang mengakibatkan kemacetan di ruas jalan keluar tol yang disebabkan kondisi jalan belum mendukung.</li> <li>Belum memadainya fasilitas parkir (<i>park and ride</i>).</li> <li>Prioritas anggaran untuk pengembangan angkutan masih sangat minim. Penggunaan pajak kendaraan bermotor dan pajak penerangan jalan belum maksimal untuk pengembangan transportasi</li> <li>Kesadaran masyarakat akan tertib</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya penyusunan Masterplan Transportasi (rencana Induk Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan)</li> <li>Adanya kajian redisain simpang sebagai dasar pembangunan simpang-simpang oleh Dinas Rumkim dan PUPR</li> <li>Pembangunan underpass Jalan Dewi Sartika oleh Provinsi Jawa Barat.</li> <li>Adanya peningkatan jalan di beberapa ruas jalan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR.</li> <li>Dilakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di beberapa ruas jalan</li> <li>Adanya kajian <i>park and ride</i>.</li> <li>Adanya bantuan anggaran dari Provinsi Jawa Barat dan Pusat (Kementerian Perhubungan)</li> <li>Adanya anggaran untuk sosialisasi Tertib Lalu Lintas dan penertiban parkir liar.</li> <li>Adanya pengembangan infrastruktur dan teknologi (ATCS) untuk pemantauan arus lalu lintas dan simpang yang dapat mengatur siklus tundaan dan antrian secara adaptif.</li> <li>Adanya Kerjasama dengan BRT, JRC dan JAC.</li> <li>Adanya kajian Studi Kelayakan Pengembangan Transportasi Massal Berbasis Rel dan kajian</li> </ol>

NO.	KLHS TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
			<p>dan keselamatan lalu lintas masih minim.</p> <p>7. Angkutan kota kurang nyaman.</p> <p>8. Belum adanya subsidi bagi angkutan umum.</p> <p>9. Angkutan massal berbasis rel di 2 koridor belum terlaksana.</p> <p>10. Belum adanya sistem layanan transportasi yang terintegrasi</p> <p>11. Feeder angkutan umum belum tersedia</p> <p>12. Masih minimnya minat swasta untuk penyediaan infrastruktur transportasi</p> <p>13. Maraknya transportasi daring yang minim pengawasan dari pemerintah</p> <p>14. Terminal Sawangan belum terbangun</p>	<p>teknis angkutan masal</p> <p>12. Telah beroperasinya LRT Harjamukti dengan feeder pendukungnya yaitu D11.</p> <p>13. Telah terimplementasinya program <i>Buy The Service</i></p> <p>14. Telah disusun DED Pembangunan terminal Sawangan.</p> <p>15. Adanya kajian Rerouting Trayek untuk menata kembali trayek- trayek.</p> <p>16. Telah diusulkan pembentukan UPT baru untuk pengembangan transportasi massal (subsidi BTS)</p> <p>17. Reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg</p>

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok

### 2.2.2 Isu Strategis

Selanjutnya yang menjadi Isu Strategis dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

**Tabel 2.22 Isu Strategis Dinas Perhubungan**

No.	Isu Strategis	Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan
1.	Infrastruktur jalan terbatas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya ruas jalan pendamping</li> <li>2. Terbatasnya kapasitas jalan dan simpang yang tidak ideal</li> <li>3. Kondisi ruas jalan alternatif yang ada kurang ideal</li> <li>4. Pusat pertumbuhan belum terbentuk secara merata</li> <li>5. Perlintasan sebidang</li> <li>6. Belum semua jalan bermarka dan dilengkapi rambu serta PJU</li> </ol>
2.	Transportasi publik belum memadai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angkutan kota kurang nyaman</li> <li>2. BRT (<i>Bus Rapid Transit</i>) dan JRC (<i>Jabodetabel Residence Connection</i>) masih terbatas</li> <li>3. Belum adanya subsidi bagi angkutan umum</li> <li>4. Angkutan massal berbasis rel di 4 (empat) koridor belum terlaksana</li> </ol>
3.	Integrasi dan konektivitas transportasi belum terbentuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TOD atau hub belum terlaksana</li> <li>2. Simpul transportasi masih kurang memadai</li> <li>3. <i>Park and ride</i> belum tersedia</li> <li>4. Halte belum merata</li> <li>5. Belum adanya sistem layanan transportasi yang terintegrasi</li> <li>6. <i>First and last mile</i> tidak efisien</li> </ol>
4	Pengelolaan Parkir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan parkir di badan jalan belum dilaksanakan secara optimal</li> <li>2. Pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah yang memiliki potensial untuk dikembangkan sebagai fasilitas</li> </ol>

No.	Isu Strategis	Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan
		<p>perparkiran belum dilakukan secara optimal</p> <p>3. Sebagian besar gedung-gedung belum menyediakan fasilitas parkir yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku</p>
5	Keselamatan	<p>1. Rendahnya disiplin dan budaya tertib berlalu lintas di masyarakat</p> <p>2. Masih banyaknya titik rawan kecelakaan (Blackspot)</p> <p>3. Belum optimalnya fasilitas pejalan kaki dan pesepeda</p> <p>4. Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan infrastruktur jalan yang berkeselamatan</p>

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok

**Tabel 2.23 Keterkaitan Isu KLHS dengan Isu Strategis PD**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perhubungan merupakan urat nadi perekonomian yang menunjang dan mendorong pertumbuhan berbagai sektor, sehingga berperan penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan dalam pelayanan perhubungan diperlukan pengintegrasian untuk kemudahan masyarakat sebagai pemanfaat transportasi	Kota Depok mengalami perkembangan yang pesat dalam berbagai aspek, baik dari segi jumlah penduduk, pembangunan infrastruktur, serta aktivitas ekonomi dan sosial. Hal ini tentu berdampak pada peningkatan volume kendaraan dan kebutuhan transportasi yang semakin tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran secara holistik dan terintegrasi dalam merencanakan sistem	Belum Optimalnya layanan infrastruktur Transportasi termasuk transportasi yang layak dan berselamatan, serta kemacetan yang berdampak pada berbagai macam sektor serta menyumbang polusi udara di perkotaan. Selain itu perlu peningkatan mekanisme layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Problem Complexity: Penerapan Revolusi Industri 5.0 (Society 5.0) berpotensi merevolusi sistem transportasi di Indonesia, menciptakan era baru transportasi untuk mendukung mobilitas yang lebih efisien, aman dan nyaman.</li> <li>2. Perubahan Iklim global, dan transportasi menjadi salah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan nasional bidang transportasi diwujudkan melalui Transformasi Ekonomi melalui penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global.</li> <li>2. Pembangunan ekonomi Indonesia selama dua puluh tahun ke depan akan menghadapi perubahan besar yang menuntut dilakukannya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama Antar Wilayah di Bidang transportasi yang harus lebih dikembangkan.</li> <li>2. Depok sebagai daerah penyangga Provinsi DKI Jakarta, memerlukan dukungan transportasi dalam mendukung mobilitas masyarakat. Selain itu Depok masuk wilayah aglomerasi menjadi kesempatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Terminal Terpadu Depok Baru dengan Pola kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) melibatkan Pemerintah Kota Depok dengan Pihak Ketiga</li> <li>2. Pengembangan Sistem Transportasi dan Penanggulangan Kemacetan. Pengembangan Sistem transportasi Kota Depok difokuskan pada beberapa Aspek penting antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Keterpaduan antara Tata Guna lahan dan Transportasi ( Kota Depok memiliki Strategi Pengembangan Kota yang tertuang dalam Peraturan presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang</li> </ul> </li> </ol>

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>serta penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan guna terwujudnya kualitas layanan di sektor perhubungan yang tertib, lancar, terpadu, terjangkau, efektif, dan efisien.</p> <p>Dinas Perhubungan merupakan unit kerja yang membantu Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan</p>	<p>transportasi yang menjamin keberlanjutan, dan kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.</p> <p>Permasalahan kemacetan menjadi permasalahan klasik di wilayah perkotaan. Termasuk Kota Depok, beberapa ruas jalan masih mengalami kemacetan dan dibutuhkan solusi serta kolaborasi antar unit kerja.</p>	<p>masyarakat di bidang perhubungan.</p>	<p>satu penyumbang emisi karbon yang mempengaruhi polusi udara. Untuk itu dibutuhkan terobosan transportasi massal sehingga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.</p> <p>3. Tantangan ketidakpastian ekonomi global berdampak negatif pada sektor transportasi. Penurunan aktivitas perdagangan,</p>	<p>transformasi ekonomi.</p> <p>3. Beberapa perubahan besar tersebut adalah perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, pergeseran geopolitik, dan geoekonomi. Di samping itu, transformasi ekonomi juga merupakan kunci untuk mewujudkan Indonesia ke luar dari jebakan negara berpendapatan menengah (Middle Income</p>	<p>kolaborasi antar wilayah dalam pengembangan sistem transportasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sistem Transportasi yang Terintegrasi. Pemerintah Kota Depok berupaya merancang sistem transportasi yang menghubungkan berbagai moda transportasi seperti KRL, LRT, Biskita dengan pola kerjasama BTS (Buy The Service) dan Angkutan Perkotaan.</li> </ul> <p>Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menanggulangi Kemacetan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekayasa Lalu lintas tugu batu sawangan</li> <li>• Kajian Redesign Simpang Keadilan sawangan</li> <li>• Kajian-kajian jalur alternatif: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan Margonda menuju Sawangan</li> <li>- Jl. Kartini menuju Pasir Putih</li> </ul> </li> </ul>

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<p>fluktuasi harga energi, dan geopolitik yang tidak stabil dapat menghambat investasi dan meningkatkan biaya transportasi</p> <p>4. Revolusi teknologi informasi, memasuki era peningkatan/perbaikan pelayanan publik memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi</p>	<p>Trap atau MIT). MIT berdampak signifikan pada sektor transportasi, karena pertumbuhan ekonomi yang lambat dapat menghambat investasi dalam infrastruktur transportasi dan pengembangan teknologi yang dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan Koridor Angkutan umum massal Trayek bojongsari sampai ke terminal Depok</li> <li>• Peningkatan Keselamatan lalu lintas dengan berbagai Langkah yang telah dilakukan antara lain : Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Daerah (RAKD), Kolaborasi dengan instansi terkait, Penertiban Parkir Liar, Edukasi Keselamatan Berlalu lintas baik angkutan jalan maupun angkutan rel</li> </ul>

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok



**Gambar 2.5 Permasalahan Transportasi di Kota Depok**

*Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok*

**Tabel 2.24 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan dengan Visi, Misi dan Program**

**Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

<b>VISI : BERSAMA DEPOK MAJU</b>				
<b>NO</b>	<b>MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH</b>	<b>PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN</b>	<b>FAKTOR</b>	
			<b>PENGHAMBAT</b>	<b>PENDORONG</b>
<b>I</b>	<b>Misi 2 : Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Maju dan Ramah Lingkungan</b>			
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Masih banyaknya titik – titik kemacetan	1. Kinerja ruas jalan masih rendah akibat kapasitas jalan kurang memadai, kapasitas simpang dengan radius tikung kurang memadai, banyaknya hambatan samping seperti banyaknya angkot dan ojol yang parkir di badan jalan, pk1 di trotoar dan bahu jalan.	1. Adanya penyusunan Masterplan Transportasi (rencana Induk Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan) 2. Adanya kajian redisain simpang sebagai dasar pembangunan simpang-simpang oleh Dinas Rumkim dan PUPR 3. Adanya peningkatan jalan di beberapa ruas jalan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR

			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan ruas jalan baru.</li> <li>3. Pembangunan tol baru yang mengakibatkan kemacetan di ruas jalan keluar tol yang disebabkan kondisi jalan belum mendukung.</li> <li>4. Belum memadainya fasilitas parkir (<i>park and ride</i>).</li> <li>5. Minimnya anggaran untuk membangun infrastruktur kapasitas jalan, penggunaan</li> <li>6. pajak kendaraan bermotor belum maksimal untuk pengembangan transportasi</li> <li>7. Kesadaran masyarakat akan tertib dan keselamatan lalu lintas masih minim.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Dilakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di beberapa ruas jalan</li> <li>5. Adanya bantuan anggaran dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta dan Pusat (Kementerian Perhubungan).</li> </ol>
--	--	--	--	--

		<p>2. Pengembangan transportasi publik belum memadai</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prioritas anggaran untuk pengembangan angkutan masih sangat minim</li> <li>2. Angkutan kota kurang nyaman.</li> <li>3. Belum adanya subsidi bagi angkutan umum.</li> <li>4. Angkutan massal berbasis rel di 2 koridor belum terlaksana.</li> <li>5. Belum adanya sistem layanan transportasi yang terintegrasi</li> <li>6. Feeder angkutan umum belum tersedia</li> <li>7. Masih minimnya minat swasta untuk penyediaan infrastruktur transportasi</li> <li>8. Maraknya transportasi daring yang minim pengawasan dari pemerintah</li> <li>9. Terminal Sawangan belum terbangun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Kerjasama dengan BRT, JRC dan JAC.</li> <li>2. Adanya kajian Studi Kelayakan Pengembangan Transportasi Massal Berbasis Rel dan kajian teknis angkutan masal</li> <li>3. Telah beroperasinya LRT Harjamukti dengan feeder pendukungnya yaitu D11 dan Biskita Trans Depok.</li> <li>4. Telah dilaksanakannya subsidi <i>Buy The Service</i> dari Kementrian Perhubungan.</li> <li>5. Telah disusun DED Pembangunan terminal Sawangan.</li> <li>6. Adanya kajian Rerouting Trayek untuk menata kembali trayek-trayek.</li> <li>7. Telah diusulkan pembentukan UPT baru untuk pengembangan transportasi massal (subsidi BTS)</li> </ol>
--	--	--	--	--

		3. Layanan PJU yang belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya gap yang masih tinggi antara kebutuhan dan jumlah eksisting.</li> <li>2. Terbatasnya anggaran pengadaan dan pemeliharaan PJU, Sebagian besar digunakan untuk pembayaran listrik.</li> <li>3. Sarpras layanan PJU kurang memadai.</li> <li>4. Teknisi PJU terbatas</li> <li>5. Penggunaan Pajak Penerangan Jalan masih minim untuk penyediaan PJU</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen pimpinan daerah untuk meningkatkan layanan PJU.</li> <li>2. Adanya dana kelurahan yang dialokasikan untuk pengadaan PJL.</li> <li>3. Adanya bantuan anggaran dari provinsi dan pusat untuk pengadaan PJU.</li> <li>4. Tersedianya anggaran untuk penyediaan crane PJU</li> </ol>
		4. Belum optimalnya layanan Uji KIR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gedung kantor dan lahan parkir layanan Uji KIR sudah tidak memadai.</li> <li>2. SDM Penguji masih kurang.</li> <li>3. Fasilitas parkir layanan Uji KIR yang belum memadai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya usulan pembangunan untuk lahan parkir.</li> <li>2. Pelayanan Uji Kir Dishub telah mendapat akreditasi A sehingga dapat mendorong peningkatan layanan.</li> <li>3. Tersedianya anggaran untuk pengembangan teknologi informasi dalam rangka peningkatan layanan.</li> </ol>

**Tabel 2.25 Permasalahan Pelayanan Dishub Kota Depok Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan**

NO.	MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Mewujudkan Transportasi nasional yang berkelanjutan	1. Integrasi dan konektivitas transportasi di Kota Depok belum terbentuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TOD atau hub belum terlaksana</li> <li>2. Simpul transportasi masih kurang memadai</li> <li>3. Park and ride belum tersedia</li> <li>4. Halte belum merata</li> <li>5. Belum adanya sistem layanan transportasi yang terintegrasi</li> <li>6. <i>First and mile</i> tidak efisien</li> <li>7. Angkutan massal berbasis rel di 2 koridor belum terlaksana.</li> <li>8. Feeder angkutan umum belum tersedia</li> <li>10. Masih minimnya minat swasta untuk penyediaan infrastruktur transportasi</li> <li>11. Terminal Sawangan belum terbangun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Kerjasama dengan BRT, JRC dan JAC.</li> <li>2. Adanya kajian Studi Kelayakan Pengembangan Transportasi Massal Berbasis Rel dan kajian teknis angkutan masal</li> <li>3. Telah beroperasinya LRT Harjamukti dengan feeder pendukungnya yaitu D11</li> <li>4. Telah disusun DED Pembangunan terminal Sawangan.</li> <li>5. Adanya kajian Rerouting Trayek untuk menata kembali trayek- trayek.</li> <li>6. Reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg</li> </ol>

2	Mewujudkan Transformasi Struktural dalam Penyelenggaraan Transportasi Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan prasarana pelayanan belum memadai seperti sapras layanan Uji KIR</li> <li>2. Layanan terminal belum optimal</li> <li>3. Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam layanan perhubungan</li> <li>4. Layanan PJU belum optimal</li> <li>5. Ketersediaan anggaran yang terbatas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gedung layanan Uji KIR kurang layak karena sudah lama dan perlu perbaikan</li> <li>2. Sarana parkir layanan Uji KIR belum memadai</li> <li>3. Tenaga penguji terbatas</li> <li>4. Terminal masih dalam tahap BGS</li> <li>5. Teknisi PJU terbatas</li> <li>6. Kendaraan teknis dan operasional terbatas dan sudah tua (Derek, crane dan kendaraan operasional lainnya)</li> <li>7. Pagu anggaran 50% untuk pembayaran listrik PJU dan gaji Non ASN sehingga anggaran untuk kegiatan teknis sangat minim</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya usulan pembebasan lahan dan pembangunan untuk lahan parkir.</li> <li>2. Pelayanan Uji Kir Dishub telah mendapat akreditasi A sehingga dapat mendorong peningkatan layanan.</li> <li>3. Adanya koordinasi antara timwas BGS terminal dan pihak terkait lainnya</li> <li>4. Tersedianya anggaran untuk pengembangan teknologi informasi dalam rangka peningkatan layanan.</li> <li>5. Adanya dana kelurahan yang dialokasikan untuk pengadaan PJL</li> <li>6. Adanya bantuan anggaran dari provinsi dan pusat untuk pengadaan PJU</li> <li>7. Tersedianya anggaran untuk penyediaan crane PJU.</li> <li>8. Berkoordinasi dan mengusulkan penambahan anggaran ke TAPD.</li> <li>9. Menerapkan ISO di unit layanan.</li> </ol>
---	--	---	--	---

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok

**Tabel 2.26 Permasalahan Pelayanan Dishub Kota Depok Berdasarkan Renstra Dishub Provinsi Jawa Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan**

<b>VISI : BERSAMA DEPOK MAJU</b>				
<b>NO.</b>	<b>MISI DAN PROGRAM PROVINSI JAWA BARAT</b>	<b>PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN</b>	<b>FAKTOR</b>	
			<b>PENGHAMBAT</b>	<b>PENDORONG</b>
<b>I</b>	<b>Misi 2 : Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang maju dan ramah lingkungan</b>			
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	1. Penyediaan perlengkapan jalan belum optimal	1. Anggaran Dishub sebagian besar untuk pembayaran rekening listrik PJU, gaji PNS dan Non ASN sehingga anggaran untuk penyediaan perlengkapan jalan sangat minim 2. Masih banyak ruas jalan yang belum dilengkapi rambu dan marka 3. Belum adanya kajian kebutuhan perlengkapan jalan 4. Adanya gap yang tinggi antara kebutuhan dan ketersediaan PJU 5. Pajak kendaraan bermotor dan pajak penerangan jalan untuk pengembangan transportasi dan penyediaan perlengkapan jalan belum optimal.	1. Adanya koordinasi ke TAPD terkait penambahan anggaran 2. Adanya bantuan perlengkapan jalan dari propinsi Jawa Barat dan Kemenhub 3. Adanya dana kelurahan yang mengalokasikan untuk penyediaan PJJ

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok

**Tabel 2.27 Permasalahan Pelayanan Dishub Kota Depok Berdasarkan RTRW Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan**

NO.	RTRW TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Peningkatan kualitas dan kuantitas terminal penumpang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggaran terbatas</li> <li>2. Kondisi terminal yang ada kurang representative</li> <li>3. Pembangunan terminal Sawangan belum terwujud</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya pengalokasian anggaran karena asset terminal telah dikerjasamakan (Bangun Guna Serah)</li> <li>2. Terbatasnya anggaran untuk pembebasan lahan terminal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan anggaran ke TAPD</li> <li>2. sudah dilakukan studi kelayakan terminal Tipe C pada tahun 2017 dan DED terminal sawangan di Tahun 2022</li> </ol>
2	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung transportasi lalu lintas dan angkutan jalan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan anggaran terbatas</li> <li>2. Sarpras pendukung transportasi masih terbatas</li> <li>3. Pengembangan angkutan umum masih minim</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pagu anggaran 50% untuk pembayaran listrik PJU dan gaji Non ASN sehingga anggaran untuk kegiatan sangat minim</li> <li>2. Pajak penerangan jalan dan pajak kendaraan bermotor belum optimal penggunaannya untuk pengembangan transportasi</li> <li>3. Fasilitas parkir (<i>park and ride</i>) belum memadai</li> <li>4. Potensi parkir belum digali</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya bantuan anggaran dari provinsi dan pusat untuk PJU dan perlengkapan jalan lainnya di jalan provinsi dan nasional serta penganggaran di dana kelurahan.</li> <li>2. Sudah ada studi kelayakan <i>park and ride</i> pada tahun 2019</li> <li>3. Adanya Peraturan Walikota tentang Kerjasama Perparkiran</li> <li>4. Adanya penyusunan Masterplan Transportasi (rencana Induk</li> </ol>

NO.	RTRW TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
			<p>secara optimal</p> <p>5. Halte belum merata, lahan untuk lokasi halte masih sulit karena harus fasos fasum, terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan halte, minimnya penggunaan halte sejalan dengan kondisi angkutan umum yang semakin terpuruk</p> <p>6. Masih tingginya gap kebutuhan dan realisasi dari PJU, kurangnya sarpras dan SDM teknisi PJU untuk layanan ke Masyarakat</p> <p>7. JPO, Zebra cross dan ZOSS masih sangat terbatas karena terbatasnya anggaran</p> <p>8. Masih kurangnya rambu dan marka di setiap ruas jalan di Kota Depok</p>	<p>Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan)</p> <p>5. Adanya bantuan anggaran dari Provinsi Jawa Barat dan Pusat (Kementerian Perhubungan)</p> <p>6. Adanya anggaran untuk sosialisasi Tertib Lalu Lintas dan penertiban parkir liar.</p> <p>7. Adanya pengembangan infrastruktur dan teknologi (ATCS) untuk pemantauan arus lalu lintas dan simpang yang dapat mengatur siklus tundaan dan antrian secara adaptif.</p> <p>8. Adanya Kerjasama dengan BRT, JRC dan JAC.</p> <p>9. Adanya kajian Studi Kelayakan Pengembangan Transportasi Massal Berbasis Rel dan kajian teknis angkutan masal</p>

NO.	RTRW TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
			<p>9. Angkutan kota kurang nyaman.</p> <p>10. Belum adanya subsidi bagi angkutan umum.</p> <p>11. Angkutan massal berbasis rel di 2 koridor belum terlaksana.</p> <p>12. Belum adanya sistem layanan transportasi yang terintegrasi</p> <p>13. Feeder angkutan umum belum tersedia</p> <p>14. Masih minimnya minat swasta untuk penyediaan infrastruktur transportasi</p> <p>15. Maraknya transportasi daring yang minim pengawasan dari pemerintah</p>	<p>10. Telah beroperasinya LRT Harjamukti dengan feeder pendukungnya yaitu D11.</p> <p>11. Implementasi program subsidi <i>Buy The Service</i> ke Kementerian Perhubungan.</p> <p>12. Adanya kajian Rerouting Trayek untuk menata kembali trayek-trayek.</p> <p>13. Telah diusulkan pembentukan UPT baru untk pengembangan transportasi missal (subsidi BTS)</p>

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kegiatan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok merupakan indikator yang mendasari perumusan strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan Infrastruktur. Visi pembangunan jangka pendek 2025-2029 yang diusung oleh Wali Kota terpilih adalah "**Bersama Depok Maju**". Visi ini mencerminkan semangat kolaborasi dan inovasi dalam membangun Kota Depok agar lebih maju dalam berbagai aspek, dengan penekanan pada inklusivitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Maju, mencerminkan kondisi Kota Depok yang modern, kreatif dan berdaya saing dengan sumber daya manusia yang produktif, infrastruktur yang ramah lingkungan, ekonomi yang kreatif berbasis teknologi, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Secara operasional, visi "Bersama Depok Maju" dijabarkan ke dalam tiga aspek utama yang berkaitan dengan Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Maju dan Ramah Lingkungan yaitu :

- a. Mempercepat penyediaan infrastruktur berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah;
- b. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan terintegrasi, serta memperkuat ketahanan kota terhadap bencana dan perubahan iklim;
- c. Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman secara merata.

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok merupakan proses strategis untuk menemukan titik temu antara tujuan di RPJMD dengan mandat Tupoksi dari dinas itu sendiri. Dalam merumuskan tujuan Renstra Dishub Depok adalah dengan cara mengidentifikasi Sasaran RPJMD mana yang paling bisa didukung sesuai dengan kewenangannya, lalu menerjemahkannya menjadi sebuah pernyataan tujuan yang spesifik, terukur, dan akan dicapai oleh dinas tersebut dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Dinas Perhubungan dalam menjalankan tupoksinya mengemban misi ke kedua. Dalam pencapaian misi, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan dalam misi 2 yang sesuai dengan tupoksi Dinas Perhubungan adalah mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah melalui transformasi yang berkeselamatan dengan sasaran meningkatnya penyelenggaraan lalu

lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan dan berkelanjutan. Indikator sasaran yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan yaitu Kecepatan rata-rata dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dishub.

### **3.1 TUJUAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029**

Tujuan adalah sebuah pernyataan umum mengenai apa yang ingin dicapai. Tujuan Dinas Perhubungan dalam mendukung Misi Kota Depok adalah ***Mewujudkan Konektivitas dan Aksebilitas antar Wilayah berbasis Transportasi yang Berkeselamatan.*** Transportasi yang berkeselamatan adalah transportasi yang dirancang dan dioperasikan untuk meminimalkan resiko kecelakaan dan cedera bagi penggunaannya, termasuk pengemudi, penumpang, pejalan kaki dan pengendara sepeda. Adapun yang harus dipenuhi untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu :

- Pengembangan transportasi publik
- Desain Infrastruktur yang aman (jalan, jembatan, persimpangan)
- Pengaturan lalu lintas yang efektif
- Penggunaan Teknologi keselamatan (seperti sistem pengereman otomatis)
- Pendidikan dan Pelatihan keselamatan bagi pengguna dan pengguna transportasi
- Penegasan hukum lalu lintas yang konsisten

### **3.2 SASARAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029**

Sasaran strategis adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kota Depok dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran strategis merupakan arah atau fokus masalah yang akan dibenahi.

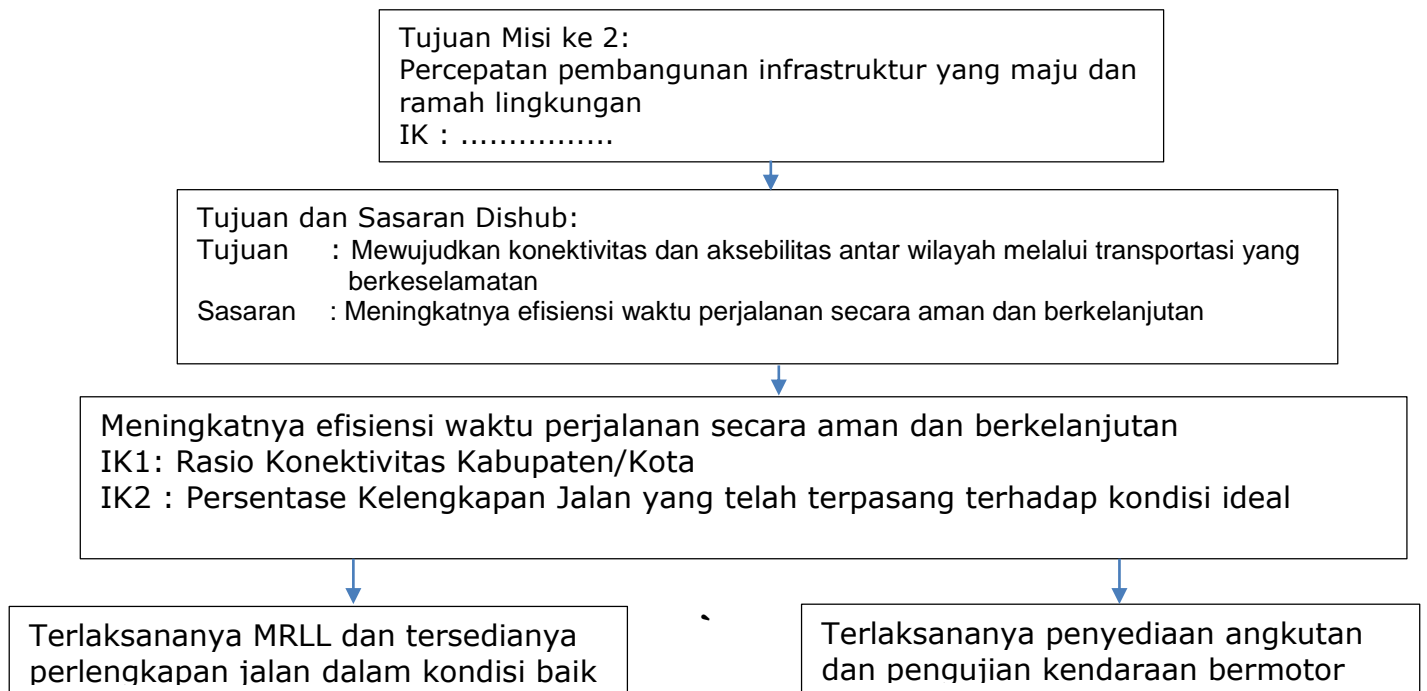
Sasaran strategis Dinas Perhubungan pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 ada 2 (dua) yaitu :

1. Meningkatnya Efisiensi waktu perjalanan secara aman dan berkelanjutan dengan indikator **Kecepatan Rata-Rata.**
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Digital dengan indikator **Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan.**

**Tabel 3.1 Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok**

Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator
Misi 2 :Percepatan Pembangunan Infastruktur yang Maju dan Ramah Lingkungan		
Tujuan 1	Mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah melalui transportasi yang berkeselamatan	V/C Ratio
Sasaran 1	Meningkatnya Efisiensi waktu perjalanan secara aman dan berkelanjutan	Kecepatan Rata-rata
Sasaran 2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata Kelola digital	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok



**Gambar 3.1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra**

**Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan dalam RPJMD Kota Depok**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.1 Terwujudnya infrastruktur yang maju, merata, ramah lingkungan dan berketahanan iklim	1.1.1 Indeks Kota Hijau	1.1.1.1 Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Antar Wilayah	1.1.1.1.1 Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)

Sumber : RPJMD Kota Depok 2025-2029

### **3.3 STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029**

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Depok dan target pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029, serta dalam rangka merespon permasalahan dan isu strategis yang ada dengan berpedoman pada NSPK dan kewenangannya, Dinas Perhubungan menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NSPK Urusan Perhubungan	Mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah melalui transportasi yang berkeselamatan		V/C Ratio	Poin	0,72	0,71	0,70	0,69	0,68	0,66	0,65	
Sasaran RPJMD		Meningkatnya Efisiensi waktu perjalanan secara aman dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata Kelola Digital	Kecepatan Rata-rata  Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Km/jam  Poin	34,59  N/A	34,8  59,97	35  61	35,2  63	35,4  65	35,7  67	36  69	

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok

### 3.4 ARAH KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Perhubungan Kota Depok harus mempunyai suatu strategi dan arah kebijakan yang tepat. Strategi dan arah kebijakan merupakan suatu rumusan perencanaan yang komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien.

**Tabel 3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok**

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	STRATEGI RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5	6
		Penyediaan Transportasi umum yang inklusif secara merata ke seluruh wilayah kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan layanan angkutan umum</li> <li>2. Optimalisasi rencana angkutan umum masal</li> <li>3. Peningkatan layanan terminal</li> <li>4. Peningkatan layanan Pengujian kendaraan bermotor</li> <li>5. Pengembangan dan Penataan jaringan Trayek</li> <li>6. Penyediaan layanan angkutan feeder</li> <li>7. Penyediaan fasilitas park and ride</li> <li>8. Peningkatan dan pengembangan simpul transportasi</li> <li>9. pengusulan subsidi untuk pengembangan angkutan umum</li> </ol>	Mengembangkan sistem transportasi publik yang terintegrasi untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah	
		Peningkatan Konektivitas antara wilayah Barat- Timur Kota Depok	Meningkatkan kapasitas infrastruktur jalan yang mendukung perekonomian di wilayah Barat dan Timur	Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung transportasi dan memperkuat integrasi antar moda	

<b>NO.</b>	<b>OPERASIONALISASI NSPK</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RPJMD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD</b>	<b>STRATEGI RENSTRA PD</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4	5	6
		Pembangunan dan perluasan coverage sarana - prasarana pelayanan transportasi Publik rendah emisi yang saling terintegrasi di wilayah metropolitan Jabotabek	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan efisiensi energi</li> <li>2. Penggunaan Transportasi massal Berkelanjutan</li> <li>3. Kerjasama antar Daerah dan Stakeholders terkait (swasta)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan Transportasi massal</li> <li>2. Mengembangkan Infrastruktur Transportasi yang ramah lingkungan</li> <li>3. Mendorong Penggunaan Transformasi yang berkelanjutan</li> </ol>	
		Penataan Kelembagaan yang adaptif dan Pengembangan karir SDM aparatur daerah berbasis meritokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas dan kuantitas keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui keikutsertaan pendidikan dan pelatihan</li> <li>2. Peningkatan penyediaan sarana prasarana perkantoran</li> <li>3. Peningkatan Pemanfaatan dan Pengembangan teknologi informasi untuk menunjang layanan Dinas Perhubungan</li> </ol>	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	
		Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan pengaduan masyarakat	Meningkatkan layanan pengaduan melalui SIMDISHUB dan layanan pengaduan masyarakat melalui Aplikasi SP4N Lapor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi layanan Dinas Perhubungan melalui Aplikasi SIMDISHUB</li> <li>2. Sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan aplikasi pengaduan SP4N Lapor</li> </ol>	

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok

**Tabel 3.5 Penahapan Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok**

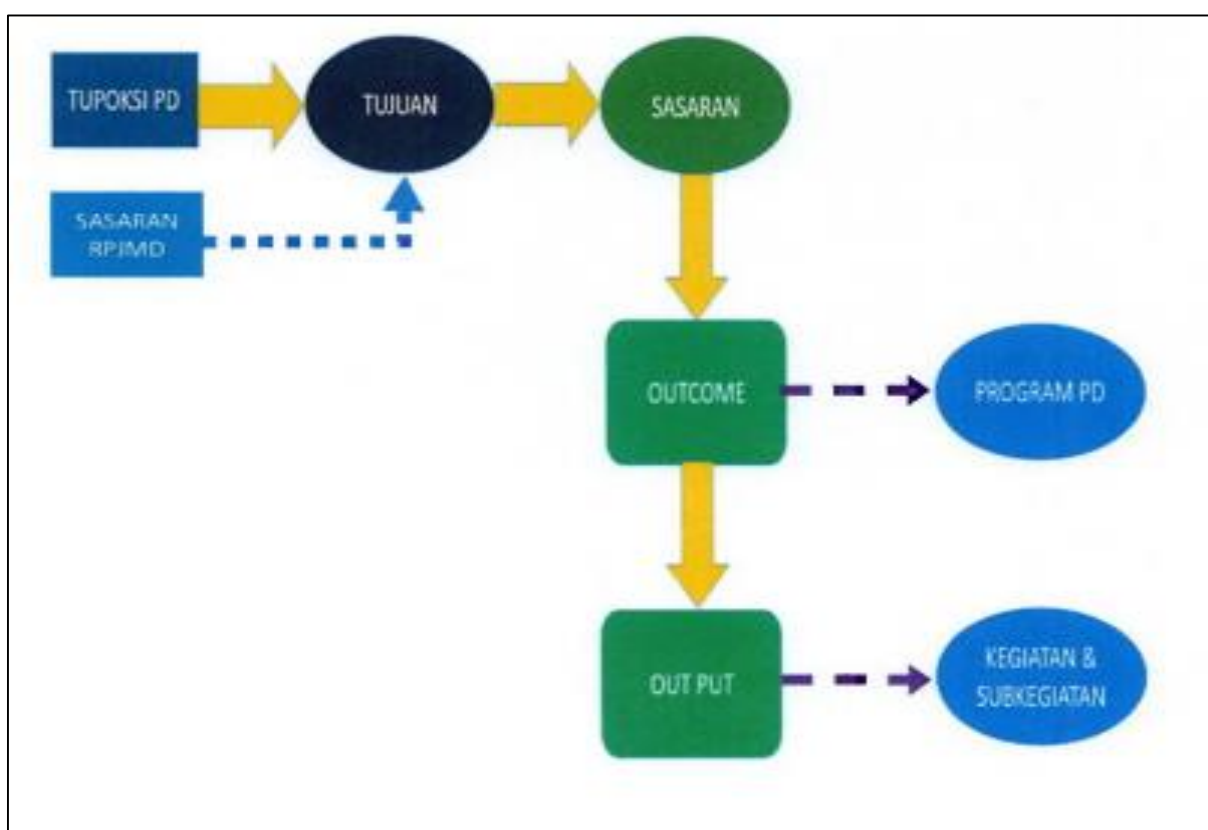
TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP IV 2028	TAHAP V 2029	TAHAP VI 2030
Kerjasama Kementrian Perhubungan dengan Dinas Perhubungan dengan Peluncuran Biskita melalui skema BTS	Serah terima (Hand Over) Biskita dari Kementrian Perhubungan ke Pemerintah Kota Depok	Penambahan Koridor Transportasi Massal dengan skema BTS Wilayah Barat	Penambahan Koridor Transportasi Massal dengan skema BTS Wilayah Tengah	Kajian Kinerja Ruas jalan	Forum Renstra 2030-2034
Fs JPO Pondok Cina	DED JPO Pondok Cina	Sistem Pengelolaan BLUD pada UPTD Transportasi	Kajian Kinerja Ruas Jalan	Pembangunan Fasilitas Penunjang (lahan parkir) UPT. PKB	Kajian Kinerja Ruas Jalan
Penyusunan Naskah Akademis Bidang Perhubungan	Pembentukan UPTD Transportasi	Kajian FS APILL Analitik	Review DED Pembangunan Parkir UPT PKB	Penambahan Koridor Transportasi Massal dengan skema BTS	Pengelolaan Operasional Transportasi Massal dengan skema BTS (3 Koridor)
Pengembangan aplikasi simdishub	Penyusunan Rancangan Perda Penyelenggaraan Perhubungan	DED terminal Pondok Rajeg	Kajian Kinerja Ruas jalan	Pengembangan aplikasi simdishub	
Pengadaan 2 unit crane PJU	Pembelian lampu PJU skema kerjasama Pemerintah dan swasta (KPBU)	Kajian Kinerja Ruas Jalan	Pengembangan aplikasi simdishub	Pengelolaan Operasional Transportasi Massal dengan skema BTS (3 Koridor)	Pengembangan aplikasi simdishub
Pengadaan 1 unit mobil crane bidang lalu lintas	Pengembangan aplikasi simdishub	Pengembangan aplikasi simdishub	Pengelolaan Operasional Transportasi Massal dengan skema BTS (3 Koridor)	Manajemen rekayasa di titik kemacetan	
	Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik	Kajian Masterplane Transportasi		Kajian Lintasan Sebidang	

## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 4.1. URAIAN PROGRAM

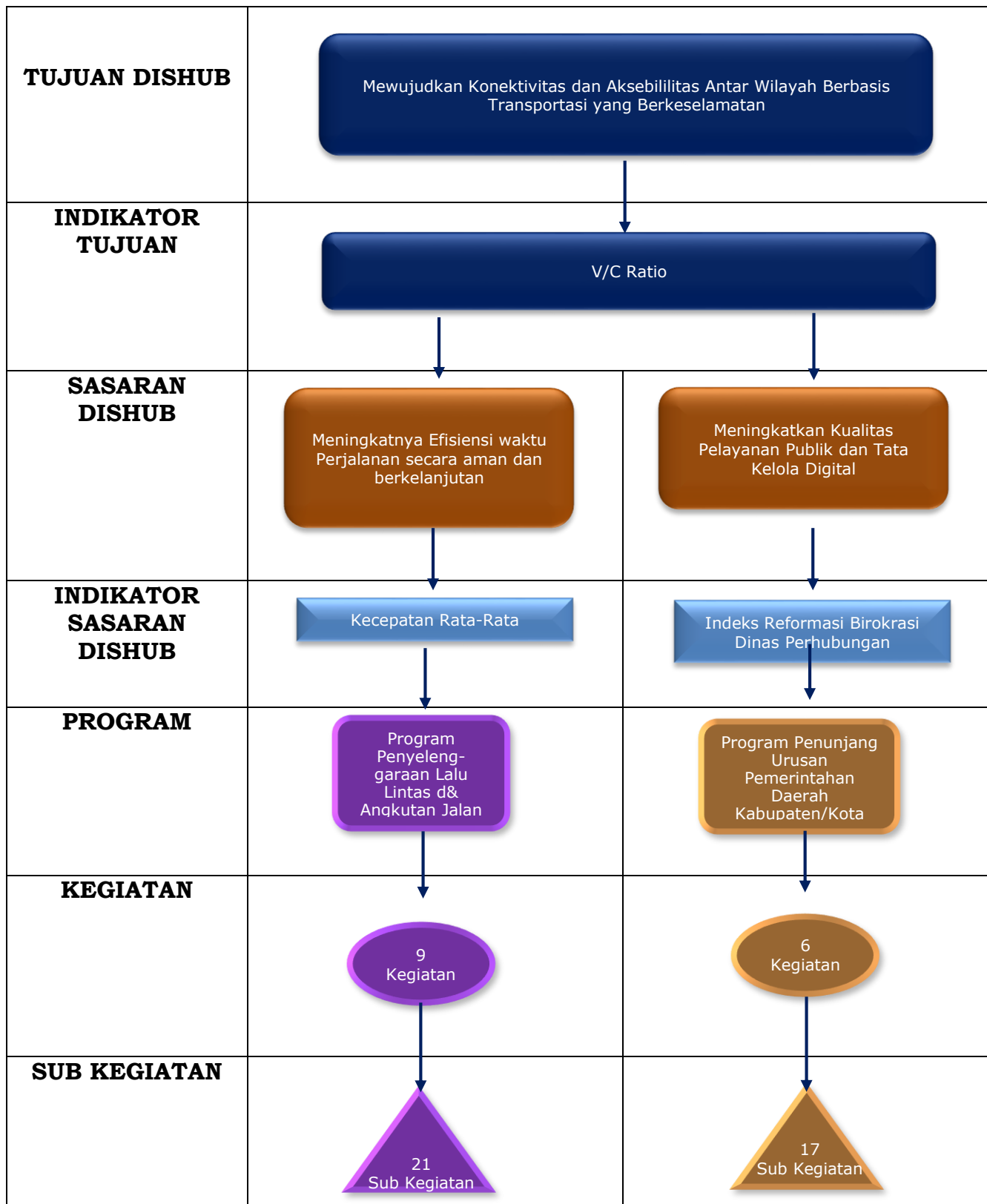
Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi (Permendagri 86/2017, Pasal 1 Angka 53)



**Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perhubungan**

Dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029, strategi kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD. Adapun prioritas program dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 terdiri dari 2 program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



**Gambar 4.2 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra**

Perumusan program yang terkait Dinas Perhubungan di dalam RPJMD Kota Depok 2025-2029 terdapat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1 Draft Rancangan Akhir RPJMD Kota Depok Tahun 2025 - 2029**

Urusan / Program Outcome	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Dinas Perhubungan	Poin	71.40	71.50	23,203,007,396	72.00	27,544,043,545	72.50	30,298,447,900	73.00	32,105,303,341	73.50	36,661,121,959.00	74.00	40,327,234,155.00
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)															
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Darat	Poin	0.61	0,615	82,728,008,980.00	0,62	130,407,531,868.00	0,62	198,330,007,045.00	0,63	207,319,729,739.00	635	217,208,424,703.00	0,64	228,085,989,164.00
	Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	Persen	51.99	54,78	60,59	67,10	74,32	80,80	87,57						

Sumber: Ranhir RPJMD 2025 – 2029

#### 4.2 URAIAN KEGIATAN

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program (Permendagri 86/2017, Pasal 1 Angka 55). Kegiatan yang direncanakan harus mampu mendukung tercapainya outcome sebagaimana tabel diatas. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program (Permendagri 86/2017, Pasal 1 Angka 59). Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud (Permendagri 86/2017, Pasal 1 Angka 58).

#### 4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA INDIKATOR

Dari 2 program diturunkan kedalam kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan isu yang terdapat di Dinas Perhubungan. Nama program,

kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan nomenklatur yang diatur dalam Kepmendagri No 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.2 Teknis Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok**

SPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan			Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
						X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	X.XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	X.XX.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
						X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	X.XX.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	X.XX.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	

SPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Peraturan Perundang-Undangan		
						X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	X.XX.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	X.XX.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
						X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	X.XX.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

SPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya efisiensi waktu perjalanan secara aman dan berkelanjutan			Rasio Konektivitas Kabupaten/ Kota	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
						2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	
				Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	
						2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	

SPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Terbangun	2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	
				Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
				Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota (PJU)	
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (PJU)	
						2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
						2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	
						2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	

SPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
						2.15.02.2.06 Pelaksanaa n Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	
				Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	
						2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	

SPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
				<i>Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota</i>	2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	
				<i>Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia</i>	2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
						2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
				<i>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	2.15.02.2.14.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	
				<i>Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	<i>Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	2.15.02.2.14.0003 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok

Dalam rangka menindaklanjuti Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dilakukan penyesuaian indikator dan target indikator kegiatan yang tertuang dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 4.3 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok**

URAIAN	KODE				BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
	BIDANG IRISAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2					<b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>			
2	15	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan</b>	<b>Nilai SAKIP Dinas Perhubungan</b>	<b>Poin</b>
2	15	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>Persen</b>
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
2	15	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya dokumen administrasi keuangan</b>	<b>persentase administrasi keuangan tepat waktu</b>	<b>Persen</b>
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang
2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan
2	15	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Persen</b>

2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket
2	15	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
2	15	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya dokumen administrasi umum perkantoran</b>	<b>persentase penyediaan administrasi umum perkantoran</b>	<b>Persen</b>
1	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
2	15	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen
					<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya barang milik daerah</b>	<b>persentase barang milik daerah dalam pelayanan</b>	<b>Persen</b>
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
2	15	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</b>	<b>Persen</b>
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
2	15	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang terpelihara</b>	<b>Persen</b>
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit

1	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
2	15	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Meningkatnya efisiensi waktu perjalanan secara aman dan berkelanjutan</b>	<b>Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota</b>	<b>Poin</b>
							<b>Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal</b>	<b>Persen</b>
2	15	02	2.01		<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>cakupan integrasi perencanaan transportasi</b>	<b>Persen</b>
2	15	02	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.02		<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal</b>	<b>Persen</b>
					Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (UPT PJU)	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (UPT PJU)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit
2	15	02	2.03		<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Terselenggaranya pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Jumlah orang yang melalui terminal setiap tahun</b>	<b>orang</b>
2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Terminal
2	15	02	2.04		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Terselenggaranya tempat parkir yang sesuai dengan peraturan perparkiran</b>	<b>Persentase penyelenggaraan parkir yang sesuai SPM</b>	<b>Persen</b>
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan

2	15	02	2.05		<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Terselenggaranya Pengujian Kendaraan Bermotor</b>	<b>Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum</b>	<b>Persen</b>
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit
2	15	02	2.05	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan
2	15	02	2.05	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan
2	15	02	2.06		<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Berkurangnya titik kemacetan di Kota Depok</b>	<b>Persentase titik kemacetan yang tertangani</b>	<b>persen</b>
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terawasinya dan Terkendalnya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	02	2.07		<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya kesesuaian rekomendasi mitigasi lalulintas yang diterapkan</b>	<b>Persentase Tindak Lanjut Monitoring Evaluasi Implementasi Andalalin</b>	<b>persen</b>
2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan
2	15	02	2.09		<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya jumlah penumpang angkutan umum</b>	<b>load factor</b>	<b>persen</b>
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terkendalnya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit

2	15	02	2.14		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya keterjangkauan layanan angkutan umum</b>	<b>rasio ijin trayek</b>	<b>rasio</b>
2	15	02	2.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	02	2.14	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terselenggaranya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok

Keterkaitan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif pada Dinas Perhubungan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.4 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN PERHUBUNGAN				106,325,274,376.00		129,515,974,766.00		134,558,816,119.00		138,903,161,076.00		140,828,635,593.00		145,693,670,107.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	71.40	72.80	23,285,007,396.00	73.30	25,169,381,327.00	73.80	25,155,460,966.00	74.30	27,263,082,994.00	74.80	27,156,743,250.00	75.30	29,656,998,747.00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	125,277,300.00	100%	193,068,729.00	100%	198,860,790.00	100%	204,826,614.00	100%	210,971,413.00	100%	217,300,554.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	3 dok	83,463,000.00	3 dok	150,000,000.00	3 dok	154,500,000.00	3 dok	159,135,000.00	4 dok	163,909,050.00	3 dok	168,826,321.00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Lap	17 lap	41,814,300.00	17 lap	43,068,729.00	17 lap	44,360,790.00	17 lap	45,691,614.00	17 lap	47,062,363.00	17 lap	48,474,233.00
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>persentase administrasi keuangan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>20,244,000,096.00</b>	<b>100%</b>	<b>20,851,320,098.00</b>	<b>100%</b>	<b>21,476,859,701.00</b>	<b>100%</b>	<b>22,121,165,492.00</b>	<b>100%</b>	<b>22,784,800,456.00</b>	<b>100%</b>	<b>23,468,110,470.00</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108 Orang	109 orang	20,207,354,096.00	113 orang	20,813,574,718.00	113 orang	21,437,981,960.00	113 orang	22,081,121,419.00	113 orang	22,743,555,061.00	113 orang	23,425,861,713.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 lap	7 lap	36,646,000.00	18 lap	37,745,380.00	18 lap	38,877,741.00	18 lap	40,044,073.00	18 lap	41,245,395.00	18 lap	42,248,757.00
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>97,700,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>720,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>100,631,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>103,649,930.00</b>	<b>100%</b>	<b>470,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>684,100,000.00</b>
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	97,700,000.00	2 paket	470,000,000.00	1 Paket	100,631,000.00	1 Paket	103,649,930.00	1 Paket	470,000,000.00	1 Paket	484,100,000.00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0.00	250 orang	250,000,000.00	-	-	-	-	-	-	250 orang	200,000,000.00
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>persentase penyediaan administrasi umum perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>950,850,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>1,354,939,500.00</b>	<b>100%</b>	<b>1,267,254,885.00</b>	<b>100%</b>	<b>1,308,539,731.00</b>	<b>100%</b>	<b>1,450,823,121.00</b>	<b>100%</b>	<b>1,495,135,014.00</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	9,974,000.00	1 paket	10,806,700.00	1 paket	11,130,901.00	1 paket	11,464,828.00	1 paket	11,808,772.00	1 paket	12,163,036.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	278,196,500.00	2 paket	88,379,000.00	2 paket	91,030,370.00	2 paket	93,761,281.00	2 paket	96,574,119.00	2 paket	99,471,343.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	20,000,000.00	1 paket	31,454,800.00	1 paket	32,398,444.00	1 paket	33,370,397.00	1 paket	34,371,509.00	1 paket	35,402,654.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	4 Paket	361,996,000.00	4 Paket	328,999,000.00	4 Paket	338,868,970.00	4 Paket	349,035,039.00	4 Paket	359,506,090.00	4 Paket	370,291,272.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	19,945,500.00	1 paket	24,040,000.00	1 paket	24,761,200.00	1 paket	25,504,036.00	1 paket	26,269,157.00	1 paket	27,057,231.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	-	-	0.00	1 Dokumen	120,000,000.00	-	0.00	-	0.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00

	Undangan yang Disediakan													
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 laporan	260,738,000.00	12 laporan	593,500,000.00	12 laporan	611,305,000.00	12 laporan	629,644,150.00	12 laporan	648,533,474.00	12 laporan	667,989,478.00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	0.00	1 Dokumen	157,760,000.00	1 Dokumen	157,760,000.00	1 Dokumen	165,760,000.00	1 Dokumen	173,760,000.00	1 Dokumen	182,760,000.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase barang milik daerah dalam pelayanan	100%	100%	0.00	100%	211,613,008.00	100%	217,961,400.00	100%	1,574,500,243.00	100%	231,235,252.00	100%	1,723,172,311.00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1 unit	1,350,000,000.00	-	0.00	1 unit	1,485,000,000.00
Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	21 unit	211,613,000.00	21 unit	217,961,390.00	21 unit	224,500,231.00	21 unit	231,235,238.00	21 unit	238,172,295.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	100%	1,352,640,000.00	100%	1,306,540,000.00	100%	1,346,036,200.00	100%	1,386,108,286.00	100%	1,427,691,534.00	100%	1,470,522,280.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	622,100,000.00	12 laporan	610,000,000.00	12 laporan	628,300,000.00	12 laporan	647,149,000.00	12 laporan	666,563,470.00	12 laporan	686,560,374.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	730,540,000.00	12 laporan	696,540,000.00	12 laporan	717,736,200.00	12 laporan	738,959,286.00	12 laporan	761,128,064.00	12 laporan	783,961,906.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	514,540,000.00	100%	531,900,000.00	100%	547,857,000.00	100%	564,292,710.00	100%	581,221,488.00	100%	598,658,134.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	34 unit	189,860,000.00	63 unit	214,500,000.00	63 unit	220,935,000.00	63 unit	227,563,050.00	63 unit	234,389,941.00	63 unit	241,421,639.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	40 unit	34,790,000.00	25 unit	55,430,000.00	25 unit	57,092,900.00	25 unit	58,805,687.00	25 unit	60,569,857.00	25 unit	62,386,953.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3 unit	289,890,000.00	3 unit	261,970,000.00	3 unit	269,829,100.00	3 unit	277,923,973.00	3 unit	286,261,690.00	3 unit	294,849,542.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	0.60	0.615	20,897,677,300.00	0.62	42,226,819,619.00	0.63	45,156,308,119.00	0.63	45,465,619,635.00	0.64	45,512,200,143.00	0.64	45,832,188,395.00
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	50.09%	52.91%		59%		66%		74%		81%		88%	

Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	cakupan integrasi perencanaan transportasi	100%	100%	350,000,000.00	100%	675,000,000.00	100%	350,000,000.00	100%	350,000,000.00	100%	350,000,000.00	100%	350,000,000.00
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	6 Dokumen	5 dokumen	350,000,000.00	5 dokumen	675,000,000.00	5 dokumen	350,000,000.00	5 dokumen	350,000,000.00	5 dokumen	350,000,000.00	5 dokumen	350,000,000.00
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan kewenangan kota yang telah memiliki perlengkapan jalan lengkap	36.26%	37.26%	6,178,844,300.00	38%	6,614,209,629.00	39%	9,212,635,917.00	40%	9,489,014,994.00	41%	9,501,675,114.00	42%	9,786,725,367.00
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	200 Unit	160 unit	3,552,129,300.00	188 unit	3,658,693,179.00	190 unit	5,368,453,974.00	208 unit	5,529,507,593.00	208 unit	5,529,507,593.00	210 unit	5,695,392,821.00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	10 Unit	10 unit	143,475,000.00	10 unit	147,779,250.00	10 unit	152,212,627.00	10 unit	156,779,006.00	10 unit	161,482,376.00	10 unit	166,326,847.00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	66 Unit	23 Unit	2,483,240,000.00	100 unit	2,557,737,200.00	23 Unit	3,434,469,316.00	23 Unit	3,537,503,395.00	23 Unit	3,537,503,395.00	23 Unit	3,643,628,497.00
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase penyelenggaraan parkir yang sesuai SPM	100%	100%	229,785,000.00	100%	236,678,550.00	100%	243,778,906.00	100%	251,092,273.00	100%	258,625,041.00	100%	266,383,793.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan	229,785,000.00	12 laporan	236,678,550.00	12 laporan	243,778,906.00	12 laporan	251,092,273.00	12 laporan	258,625,041.00	12 laporan	266,383,793.00
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase titik kemacetan yang tertangani	65.9%	58.49%	12,749,442,000.00	60.38%	13,131,925,260.00	62.26%	13,133,816,958.00	64.15%	13,135,765,406.00	64.15%	13,137,772,309.00	66.04%	13,139,839,418.00
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 laporan	12,688,222,000.00	12 laporan	13,068,868,660.00	12 laporan	13,068,868,660.00	12 laporan	13,068,868,660.00	12 laporan	13,068,868,660.00	12 laporan	13,068,868,660.00
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	11 Laporan	3 Laporan	61,220,000.00	3 Laporan	63,056,600.00	3 Laporan	64,948,298.00	3 Laporan	66,896,746.00	3 Laporan	68,903,649.00	3 Laporan	70,970,758.00
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Tindak Lanjut Monitoring Evaluasi Implementasi Andalalin	100%	100%	29,986,000.00	100%	30,885,580.00	100%	31,812,147.00	100%	32,766,511.00	100%	33,749,507.00	100%	34,761,992.00

Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12 Laporan	12 laporan	29,986,000.00	12 laporan	30,885,580.00	12 laporan	31,812,147.00	12 laporan	32,766,511.00	12 laporan	33,749,507.00	12 laporan	34,761,992.00
<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>load factor</b>	<b>31.42</b>	<b>32</b>	<b>979,580,000.00</b>	<b>32</b>	<b>21,102,967,400.00</b>	<b>33</b>	<b>21,736,056,422.00</b>	<b>33</b>	<b>21,745,326,422.00</b>	<b>34</b>	<b>21,754,874,522.00</b>	<b>34</b>	<b>21,764,709,065.00</b>
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 laporan	200,000,000.00	12 laporan	300,000,000.00	12 laporan	309,000,000.00	12 laporan	318,270,000.00	12 laporan	327,818,100.00	12 laporan	337,652,643.00
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	3500 Unit	15 unit	779,580,000.00	15 unit	20,802,967,400.00	15 unit	21,427,056,422.00	30 Unit	21,427,056,422.00	30 Unit	21,427,056,422.00	45 unit	21,427,056,422.00
<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>rasio ijin trayek</b>	<b>0.0014</b>	<b>0.0015</b>	<b>380,040,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>435,153,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>448,207,769.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461,654,029.00</b>	<b>0.00</b>	<b>475,503,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>489,768,760.00</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	2 laporan	250,440,000.00	12 laporan	257,953,200.00	12 laporan	265,691,769.00	12 laporan	273,662,549.00	12 laporan	281,872,426.00	12 laporan	290,328,599.00
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Unit	12 Unit	129,600,000.00	12 Unit	177,200,000.00	12 Unit	182,516,000.00	12 Unit	187,991,480.00	12 Unit	193,631,224.00	12 Unit	199,440,161.00

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal (UPTD PJU)	72.63%	74.79%	56,372,735,100.00	77%	56,429,296,103.00	79%	58,122,174,986.00	81%	59,865,840,236.00	83%	61,661,815,443.00	86%	63,511,669,906.00
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (UPT PJU)	Persentase panjang jalan yang terlayani penerangan jalan umum	41.25%	42.48%	56,372,735,100.00	44%	56,429,296,103.00	45%	58,122,174,986.00	46%	59,865,840,236.00	47%	61,661,815,443.00	49%	63,511,669,906.00
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (UPT PJU)	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	703 unit	600 unit	7,303,200,100.00	600 unit	8,022,296,103.00	600 unit	8,262,964,986.00	600 unit	8,510,853,936.00	600 unit	8,766,179,554.00	600 unit	9,029,164,940.00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (UPT PJU)	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	6836 unit	5800 unit	49,069,535,000.00	5800 unit		5800 unit	49,859,210,000.00	5800 unit	51,354,986,300.00	5800 unit	52,895,635,889.00	5800 unit	54,482,504,966.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kendaraan umum sesuai trayek resmi yang masuk terminal	79.95%	82.45%	4,201,928,300.00	85%	4,327,986,149.00	87%	4,457,825,733.00	90%	4,591,560,506.00	92%	4,729,307,321.00	95%	4,871,186,540.00
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rata - rata waktu tunggu bus di terminal	9.4 menit	9.4 menit	4,201,928,300.00	8.5 menit	4,327,986,149.00	8 menit	4,457,825,733.00	7.5 menit	4,591,560,506.00	7 menit	4,729,307,321.00	6.5 menit	4,871,186,540.00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 unit	1 unit	4,201,928,300.00	1 unit	4,327,986,149.00	1 unit	4,457,825,733.00	1 unit	4,591,560,506.00	1 unit	4,729,307,321.00	1 unit	4,871,186,540.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kendaraan umum yang lulus uji laik jalan dari seluruh kendaraan yang diuji	95%	95%	1,562,176,280.00	95%	1,362,491,568.00	95%	1,667,046,315.00	95%	1,717,057,705.00	95%	1,768,569,436.00	95%	1,821,626,519.00
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPT PKB	80	83	1,562,176,280.00	86	1,362,491,568.00	89	1,667,046,315.00	92	1,717,057,705.00	95	1,768,569,436.00	98	1,821,626,519.00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	16 unit	5 Unit	117,532,000.00	5 Unit	121,057,960.00	5 Unit	124,689,699.00	5 Unit	128,430,390.00	5 Unit	132,283,302.00	5 Unit	136,251,800.00

Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	1 dokumen	256,000,000.00	1 dokumen	0.00	1 dokumen	263,680,000.00	1 dokumen	271,590,400.00	1 dokumen	279,738,112.00	1 dokumen	288,130,255.00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 unit	13 unit	129,000,000.00	13 unit	150,000,000.00	13 unit	154,500,000.00	13 unit	159,135,000.00	13 unit	163,909,050.00	13 unit	168,826,322.00
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	12 laporan	929,644,280.00	12 laporan	957,533,608.00	12 laporan	986,259,616.00	12 laporan	1,015,847,405.00	12 laporan	1,046,322,827.00	12 laporan	1,077,712,512.00
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	1 laporan	130,000,000.00	1 laporan	133,900,000.00	1 laporan	137,917,000.00	1 laporan	142,054,510.00	1 laporan	146,316,145.00	1 laporan	150,705,630.00
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>	<b>Persentase ketersediaan perencanaan dan kebijakan perkeretaapian</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>5,750,000.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
<b>Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian</b>	<b>persentase ketersediaan perencanaan dan kebijakan pengelolaan perkeretaapian</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>5,750,000.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	1 Dokumen	5,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 4.4 URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Uraian sub. kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah dilihat dari program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Diantara sub-sub kegiatan yang ada, dipilih sub kegiatan yang sesuai dan dapat dicantumkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok. Berikut adalah tabel Daftar Sub.Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Perkembangan Daerah:

**Tabel 4.5 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP Dinas Perhubungan</b>		
		<b>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		<b>persentase administrasi keuangan tepat waktu</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
		<b>Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
		<b>Persentase penyediaan administrasi umum perkantoran</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
		<b>Persentase barang milik daerah dalam pelayanan</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	

		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
		<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		<b>Persentase barang milik daerah yang terpelihara</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Rasio Konektivitas Kab/Kota</b>		
		<b>Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal</b>		
		<b>cakupan integrasi perencanaan transportasi</b>	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	
		Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
		<b>Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	
		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (UPT PJU)	
		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (UPT PJU)	
		<b>Jumlah orang yang melalui terminal setiap tahun</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	
		Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
		<b>Persentase penyelenggaraan parkir yang sesuai SPM</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
		<b>Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
		<b>Persentase titik kemacetan yang tertangani</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	

		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
		Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	
		<b>Persentase Tindak Lanjut Monitoring Evaluasi Implementasi Andalalin</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	
		<b>load factor</b>	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
		Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		<b>rasio ijin trayek</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok

#### **4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA (IKU) PERANGKAT DAERAH.**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Dinas Perhubungan Kota Depok menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Dinas Perhubungan dengan Pemerintah Kota Depok. IKU harus bisa dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat capaian kinerja dan dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan kinerja.

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disertai dengan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Depok yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target						Sasaran	Indikator Sasaran	Target					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Mewujudkan Konektivitas dan Aksebilitas antar wilayah melalui transportasi yang berkeselamatan	V/C Ratio	0,71	0,70	0,69	0,68	0,66	0,65	Meningkatnya Efisiensi waktu perjalanan secara aman dan berkelanjutan	Kecepatan Rata-Rata	34,80	35	35,20	35,40	35,70	36
								Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola digital	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	59,97	61	63	65	67	69

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok

Indikator V/C Ratio termasuk salah satu indikator yang mendukung Indikator Tujuan pada RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2026 yaitu Level Of Service (LoS).

#### **4.6 TARGET KINERJA PENYELENGGAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029**

Penjabaran dan Penyelarasan Sasaran Strategis antara Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dijelaskan pada Gambar di bawah ini :

**Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Kota Depok**

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Juta Orang	50.000.0000	55.000.000	60.000.000	65.000.000	70.000.000	75.000.000	
2.	Rasio Izin Trayek	Poin	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	
3.	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Unit	10.000	10.250	10.500	10.750	11.000	11.250	
4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Terminal	2	2	2	2	2	2	
5.	Persentase layanan angkutan darat	%	0,02%	0,03%	0,04%	0,05%	0,06%	0,07%	
6.	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum	%	0,65%	0,62%	0,58%	0,55%	0,52%	0,48%	
7.	Pemasangan Rambu-Rambu	%	65,25%	72,21%	79,18%	86,14%	93,11%	100%	
8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Poin	0,0015	0,0014	0,0013	0,0012	0,0011	0,0010	
9.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Juta Orang	50.000.000	55.000.000	60.000.000	65.000.000	70.000.000	75.000.000	
10.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Juta Orang	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000	
11.	Maturitas Manajemen Risiko Dinas Perhubungan	Level	3	3	3	3	3	3	

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok

**Tabel 4.8 Kinerja Renstra Urusan Perhubungan**

<b>TUJUAN</b>	Mewujudkan Konektivitas dan Aksebilitas antar wilayah melalui transportasi yang berkeselamatan		
<b>INDIKATOR</b>	V/C Ratio		
<b>PROGRAM</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>KET.</b>
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya efisiensi waktu perjalanan secara aman dan berkelanjutan	1. Rasio Konektivitas kabupaten/Kota 2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Draft Kepmendagri IKK

*Sumber : Dinas Perhubungan Kota Depok*



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Depok ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan selama periode 2025–2029, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Depok 2025–2029. Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2025–2029 ini merupakan penerjemahan dan penguraian lebih terperinci dari RPJMD Kota Depok Tahun 2025–2029. Dokumen ini merupakan rujukan bagi Dinas Perhubungan Kota Depok dalam menyusun rencana kerja tahunan dan dapat merupakan rujukan bagi instansi dan organisasi terkait lainnya.

Di dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Depok ini merupakan dokumen yang memberikan gambaran arah dan tujuan pembangunan bidang Perhubungan di Kota Depok. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029 ini sangat bergantung pada komitmen antara Dinas Perhubungan, pemangku kepentingan dan seluruh lapisan Masyarakat Kota Depok.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok telah mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat, mewadahi Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029, perubahan lingkungan strategis, perubahan kebijakan nasional serta menjadi cerminan dari perencanaan pembangunan Kota Depok dalam pencapaian target pembangunan jangka menengah. Target indikator, fokus dan lokus dalam renstra menyesuaikan dengan dinamika perubahan global, nasional dan regional serta ketersediaan anggaran berdasarkan pada kemampuan keuangan daerah.

Adapun kaidah-kaidah penyusunan renstra adalah:

- a. Bappeda Kota Depok telah melakukan proses teknokratis untuk menghasilkan rancangan teknokratis RPJMD Kota Depok. Selanjutnya disusun rancangan awal RPJMD Kota Depok mengacu kepada RPJPD

- Kota Depok Tahun 2025-2045.
- b. Bappeda Kota Depok melakukan proses finalisasi RPJMD 2025-2029 melalui Forum Musrenbang.
  - c. Dinas Perhubungan Kota Depok menyusun rancangan awal Renstra PD dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari Stakeholders terkait.
  - a. Dinas Perhubungan Kota Depok menyempurnakan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan RPJMD Kota Depok 2025-2029.

Tindak lanjut dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2025-2029 adalah dijadikan pedoman dalam:

- a. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Depok;
- b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- c. Monitoring dan evaluasi pasca penyusunan Renstra.

WALI KOTA DEPOK

**SUPIAN SURI**